

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Provinsi Sumatera Selatan

2022/2023

Volume 4, 2023



**INDIKATOR
TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (TPB)
Provinsi Sumatera Selatan
2022/2023**

Volume 4, 2023



***BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN***

**INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)
PROVINSI SUMATERA SELATAN 2022/2023**

Volume 4, 2023

Katalog : 3102033.16

ISSN :

Nomor Publikasi : 16000.2369

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman : xvi + 106 halaman

Penyusun Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Pembuat Kover :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Sumber Ilustrasi :

www.canva.com

Penerbit :

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Dicetak oleh : CV. Mulya Jaya

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

ISSN

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Moh Wahyu Yulianto

Penanggung Jawab :

Marpaleni

Penyunting:

Marpaleni

Lia Nurliana

Analisis :

Lia Nurliana

Etty Meila Nurty

Lismiana

Desi Eryani

Financy Ramadhani

Nita Tri Andini

Kompilasi Data:

Lia Nurliana

Etty Meila Nurty

Lismiana

Desi Eryani

Financy Ramadhani

Nita Tri Andini

Layout :

Arie Almiyati

KATA PENGANTAR

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan universal yang telah disepakati dan diimplementasikan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Data dan informasi tentang capaian implementasi TPB/SDGs dalam pembangunan nasional mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka memonitor capaian dan target serta evaluasi program pemerintah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai lembaga pemerintah penyedia data berkualitas, BPS Provinsi Sumatera Selatan telah berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan TPB/SDGs di Sumatera Selatan dalam bentuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan. Publikasi “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2022/2023” ini merupakan bentuk komitmen BPS Sumatera Selatan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Indikator yang disajikan tidak hanya berasal dari BPS saja tetapi juga berasal dari kementerian atau lembaga lain dan dinas/instansi terkait. Hal ini menunjukkan salah satu prinsip TPB/SDGs yaitu inklusif, yang diartikan keterlibatan semua *stakeholder*.

Data dan Informasi yang disajikan dalam publikasi ini telah mencakup seluruh tujuan yang ada pada indikator TPB/SDGs. Akan tetapi mengingat keterbatasan ketersediaan data, tidak semua indikator dapat disajikan dalam publikasi ini.

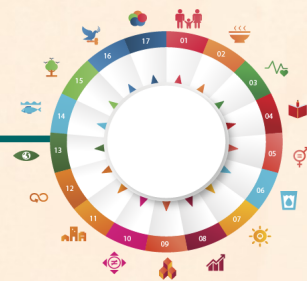
Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan pada publikasi yang akan datang.

Palembang, Desember 2023
Kepala Badan Statistik
Provinsi Sumatera Selatan



Moh Wahyu Yulianto

DAFTAR ISI



Halaman

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	1
Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	7
Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	13
Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua ..	21
Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	37
Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	43
Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua	49
Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	53
Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	67
Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara	75
Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	83
Tujuan 16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	89
Tujuan 17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	97
DAFTAR PUSTAKA.....	105

DAFTAR GAMBAR



Halaman

Gambar 1.1	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2016-2023	3
Gambar 1.2	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Pelayanan Dasar Sumatera Selatan, 2018-2022	4
Gambar 1.3	Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Hak Atas Tanah yang Didasari Oleh Dokumen dan yang Memiliki Hak Atas Tanah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tipe Kepemilikan Sumatera Selatan, 2016-2023	5
Gambar 2.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) Sumatera Selatan, 2017-2023	9
Gambar 2.2	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan Sumatera Selatan, 2017-2022	10
Gambar 2.3	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/kehutanan (Rp/ Tenaga Kerja) Sumatera Selatan, 2019-2022	10
Gambar 2.4	Indikator Anomali Harga Pangan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan (Palembang), 2019-2022	11
Gambar 3.1	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2023 ...	15
Gambar 3.2	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	16
Gambar 3.3	Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2022	16

DAFTAR GAMBAR



Halaman

Gambar 3.4	Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 Kelahiran Hidup serta Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup, 2012 dan 2020	17
Gambar 3.5	Angka Kelahiran Remaja (Umur 15-19 tahun) Per 1000 Perempuan di Kelompok Umur Yang Sama (ASFR) Provinsi Sumatera Selatan, SP191-Long Form SP2020	18
Gambar 3.6	<i>Total Fertility Rate</i> Provinsi Sumatera Selatan, SP 1971-LF SP2020	18
Gambar 3.7	Unmet Need Pelayanan Kesehatan, 2017-2022	19
Gambar 3.8	Proporsi Populasi Dengan Pengeluaran Rumah Tangga Yang Besar Untuk Kesehatan Sebagai Bagian Dari Total Pengeluaran Rumah Tangga atau Pendapatan	20
Gambar 3.9	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun	20
Gambar 4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat (persen), 2017-2023	24
Gambar 4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Sederajat (persen), 2017-2023	24
Gambar 4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat (persen), 2017-2023	25
Gambar 4.4	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun), 2017-2023	25
Gambar 4.5	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota, 2023	26
Gambar 4.6	Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/ sederajat, 2017-2022	27
Gambar 4.7	Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/ sederajat, 2017-2022	27
Gambar 4.8	Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/ sederajat, 2017-2022	27

DAFTAR GAMBAR



Halaman

Gambar 4.9	Angka anak tidak sekolah jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat), 2019-2022	28
Gambar 4.10	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), 2019-2022	28
Gambar 4.11	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (tahun), 2017-2023	29
Gambar 4.12	Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 2017-2022	30
Gambar 4.13	Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-59 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 2017-2022	30
Gambar 4.14	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SD/MI/Sederajat, 2017-2023	31
Gambar 4.15	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SMP/MTS/Sederajat, 2017-2023	32
Gambar 4.16	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat, 2017-2023 ...	32
Gambar 4.17	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki Jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, 2017-2023	33
Gambar 4.18	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun (persen), 2017-2023	34
Gambar 4.19	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Kabupaten/Kota (persen), 2022	34
Gambar 4.20	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun (persen), 2017-2023	35

DAFTAR GAMBAR



Halaman

Gambar 4.21	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-59 Tahun (persen), 2017-2023	35
Gambar 5.1	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun (persen), 2017-2022	39
Gambar 5.2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 25-49	40
Gambar 5.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Sederajat (persen), 2017-2023	41
Gambar 5.4	Proporsi Perempuan Yang Berada di Posisi Manajerial (persen), 2017-2022	42
Gambar 6.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman, 2018-2022.....	45
Gambar 6.2	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, 2018-2022.....	46
Gambar 6.3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, 2018-2022.....	47
Gambar 6.4	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka, 2018-2022.....	47
Gambar 7.1	Rasio penggunaan gas rumah tangga, 2018-2022.....	51
Gambar 8.1	Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen), 2018-2022	55
Gambar 8.2	Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2022 ...	56
Gambar 8.3	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah), 2018-2022	57

DAFTAR GAMBAR



Halaman

Gambar 8.4	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (ribu rupiah), 2022	57
Gambar 8.5	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja / Tingkat Pertumbuhan PDRB Riil per Orang Berkerja per Tahun (persen), 2018-2022	58
Gambar 8.6	Proporsi Lapangan Kerja Informal, 2018-2023	59
Gambar 8.7	Upah Rata-Rata per Jam Kerja (ribu rupiah), 2018-2022	60
Gambar 8.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2018-2023	60
Gambar 8.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal (persen), 2020-2023	61
Gambar 8.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2023	62
Gambar 8.11	Tingkat Setengah Pengangguran (persen), 2018-2023	63
Gambar 8.12	Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2022	63
Gambar 8.13	Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (persen), 2018-2022	64
Gambar 8.14	Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja, Berdasarkan Jenis Kelamin 2018-2022	65
Gambar 8.15	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang), 2018-2022	66
Gambar 8.16	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang), 2018-2022	66
Gambar 9.1	Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi Kapal Pelayaran Domestik, 2021	69

DAFTAR GAMBAR



Halaman

Gambar 9.2	Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang 2021	69
Gambar 9.3	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDRB dan Per Kapita, 2018-2022	70
Gambar 9.4	Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Per Kapita (Ribu Rupiah), 2018-2022	70
Gambar 9.5	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur Sumatera Selatan (persen), 2018-2022	71
Gambar 9.6	Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur Sumatera Selatan (persen), 2018-2022	71
Gambar 9.7	Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur (Data Pembagi) (Milyar Rupiah), 2018-2021	72
Gambar 9.8	Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi (Ribu Jiwa), 2018-2023	73
Gambar 9.9	Proporsi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi (PEPIBT) Menurut Provinsi Asal Barang(persen), 2017-2022	74
Gambar 10.1	Rasio Gini, 2018-2023	77
Gambar 10.2	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2016-2023	78
Gambar 10.3	Jumlah Desa Tertinggal, 2019-2022	78
Gambar 10.4	Jumlah Desa Mandiri, 2019-2021	79
Gambar 10.5	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal, 2018-2022	79
Gambar 10.6	Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal, 2018-2023	80

DAFTAR GAMBAR



Halaman

Gambar 10.7	Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah 50 Persen dari Median Pendapatan Penyandang Difabilitas, 2018-2022	80
Gambar 10.8	Indeks Aspek Kebebasan Sumatera Selatan (persen), 2021-2022	81
Gambar 11.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak di Sumatera Selatan, 2018-2022	85
Gambar 11.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Nyaman (Jarak 0,5 Km) ke Transportasi Umum di Sumatera Selatan, 2017 dan 2021	86
Gambar 11.3	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan Rute Tertentu di Sumatera Selatan, 2017 dan 2021	86
Gambar 11.4	Persentase Rumah Tangga di Perkotaan yang Melakukan Pengelolaan Sampah di Sumatera Selatan, 2016 dan 2019 ..	87
Gambar 11.5	Persentase Penduduk yang Mengalami Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Sumatera Selatan, 2016-2021	87
Gambar 16.1	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan dalam 12 Bulan Terakhir, 2018-2021	91
Gambar 16.2	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggal, 2014-2020	92
Gambar 16.3	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir, 2014-2020	92
Gambar 16.4	Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan Kepada Polisi, 2017-2022	93
Gambar 16.5	Indeks Kapasitas Kelembagaan Demokrasi, 2021-2022	93

DAFTAR GAMBAR



Halaman

Gambar 16.6	Indeks Aspek Kebebasan, 2021-2022	94
Gambar 16.7	Indeks Kesenjangan, 2021-2022	94
Gambar 16.8	Persentase Anak Berumur di Bawah 5 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, 2018-2022	95
Gambar 16.9	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun dengan Pendapatan 40% Bawah yang Memiliki Akta Kelahiran, 2018-2022	95
Gambar 16.10	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, 2018-2022	96
Gambar 17.1	Proporsi Total Pendapatan Pemerintah (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap PDRB Sumatera Selatan (persen), 2018-2022	99
Gambar 17.2	Rasio Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PDRB Sumatera Selatan (persen), 2018-2022	100
Gambar 17.3	Proporsi Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet, 2019-2023	100
Gambar 17.4	Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik, 2018-2022	101
Gambar 17.5	Persentase Konsumen yang Menggunakan Data dan Informasi Statistik BPS sebagai Rujukan Utama, 2018-2022	102
Gambar 17.6	Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Akses Data Badan Pusat Statistik, 2018-2022	103
Gambar 17.7	Persentase Konsumen yang Menggunakan Data BPS dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Nasional, 2018-2022	104

TUJUAN 1

**Mengakhiri Kemiskinan
dalam Segala Bentuk dimanapun**

<https://sumsubur.com/go.id>



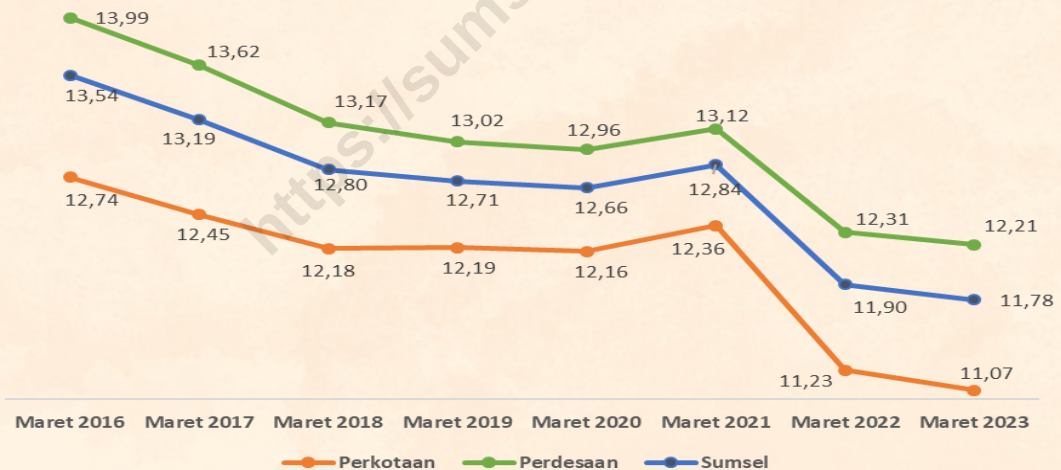
TUJUAN 1

Tanpa Kemiskinan

Kemiskinan sudah menjadi permasalahan dan isu global. Dalam menjamin pembangunan yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan harus terus dilakukan. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun pada tahun 2030. Target-target yang akan dicapai selama 15 tahun akan diulas lebih lanjut pada penjelasan berikut :

TARGET 1.2 **PADA TAHUN 2030, MENGURANGI SETIDAKNYA SETENGAH PROPORSI LAKI-LAKI, PEREMPUAN, DAN ANAK-ANAK DARI SEMUA USIA YANG HIDUP DALAM KEMISKINAN DI SEMUA DIMENSI**

INDIKATOR 1.2.1 **PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 1.1
Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan
Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2016-2023

Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pada Maret 2023, terdapat 12 dari 100 penduduk yang tinggal di daerah perdesaan dan 11 dari 100 penduduk yang tinggal di daerah perkotaan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, terdapat 12 dari 100 penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan provinsi Sumatera Selatan.

TUJUAN 1

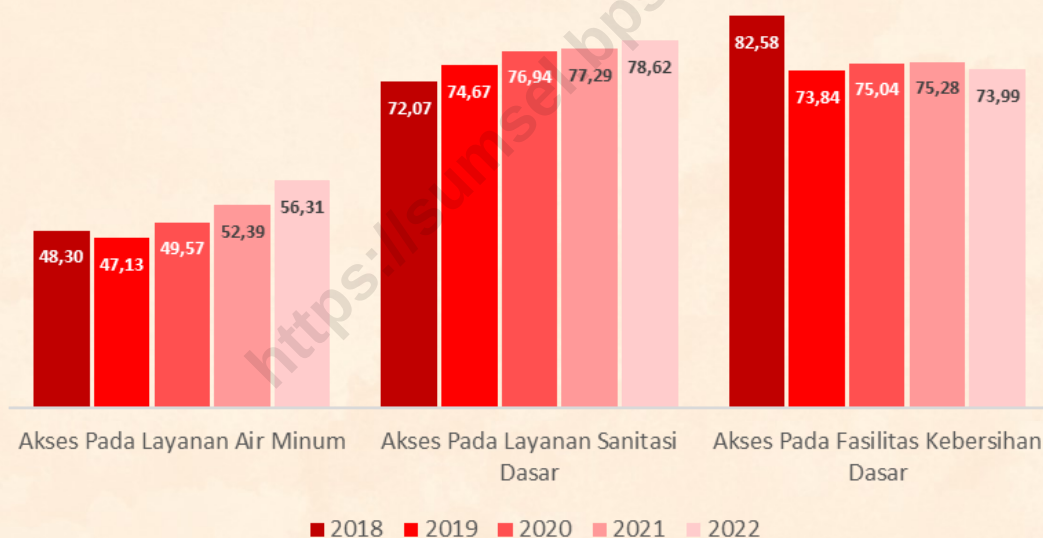


TARGET 1.4

PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN, KHUSUSNYA MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN, MEMILIKI HAK YANG SAMA TERHADAP SUMBER DAYA EKONOMI, SERTA AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR, KEPEMILIKAN DAN KONTROL ATAS TANAH DAN BENTUK KEPEMILIKAN LAIN, WARISAN, SUMBER DAYA ALAM, TEKNOLOGI BARU, DAN JASA KEUANGAN YANG TEPAT, TERMASUK KEUANGAN MIKRO

INDIKATOR 1.4.1

PROPORSI PENDUDUK/RUMAH TANGGA DENGAN AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 1.2
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Pelayanan Dasar Sumatera Selatan, 2018-2022

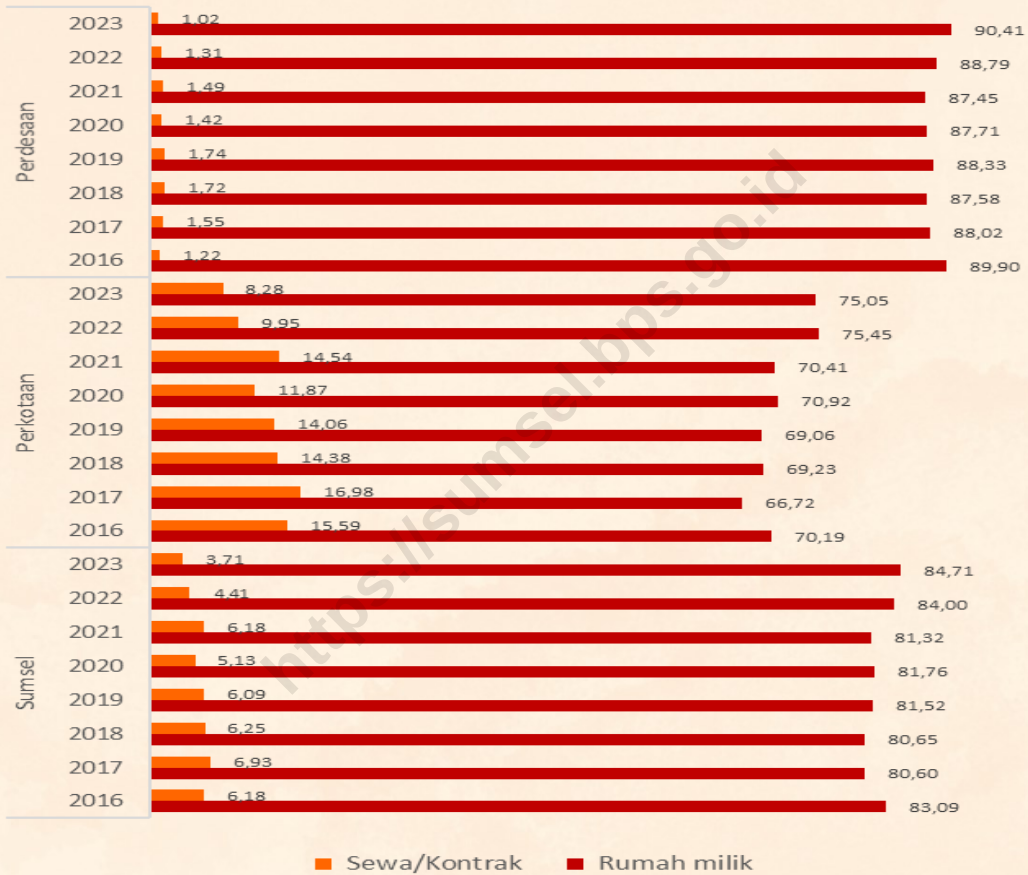
Pada tahun 2022, proporsi rumah tangga yang mempunyai akses terhadap layanan air minum dan layanan sanitasi dasar mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan fasilitas kebersihan dasar mengalami penurunan.



TUJUAN 1

INDIKATOR 1.4.2

PROPORSI DARI PENDUDUK DEWASA YANG MENDAPATKAN HAK ATAS TANAH YANG DIDASARI OLEH DOKUMEN HUKUM DAN YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN TIPE KEPEMILIKAN



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 1.3

Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Hak Atas Tanah yang Didasari Oleh Dokumen dan yang Memiliki Hak Atas Tanah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tipe Kepemilikan Sumatera Selatan, 2016-2023

Penduduk yang tinggal di daerah perdesaan lebih banyak yang menghuni rumah milik sendiri dibandingkan penduduk yang tinggal di perkotaan. Pada tahun 2023, 90 dari tiap 100 rumah tangga di perdesaan dan 75 dari tiap 100 rumah tangga di perkotaan menghuni rumah milik sendiri. Sebaliknya, penduduk yang tinggal di perkotaan lebih banyak yang menghuni rumah sewa/kontrak dibandingkan penduduk yang tinggal di perdesaan.

TUJUAN 2

**Menghilangkan Kelaparan,
Mencapai Ketahanan Pangan
dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan
Pertanian Berkelanjutan**



TUJUAN 2

Tanpa Kelaparan

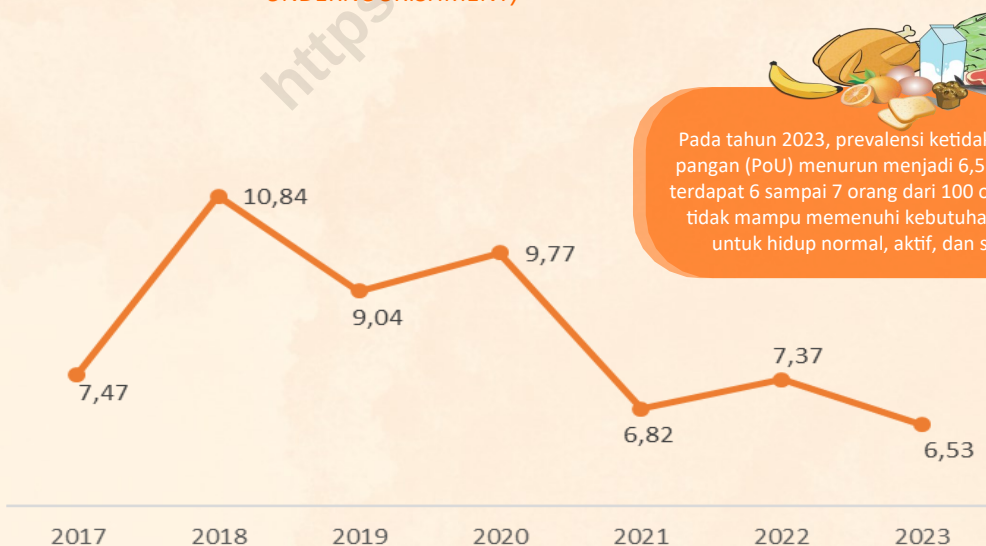
Kelaparan sebagai hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik (Lenhart 1989; Ngongi 1999). Kondisi ini terjadi karena adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar minimal pangan yang dapat disebabkan karena kurangnya daya beli maupun minimnya ketersediaan pangan yang ada. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan menjadi tujuan kedua dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat 8 target di tingkat global yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan ini.

TARGET 2.1

PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN KELAPARAN DAN MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA ORANG, KHUSUSNYA ORANG MISKIN DAN MEREKA YANG BERADA DALAM KONDISI RENTAN, TERMASUK BAYI, TERHADAP MAKANAN YANG AMAN, BERGIZI DAN CUKUP SEPANJANG TAHUN

INDIKATOR 2.1.1

PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (*PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT*)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

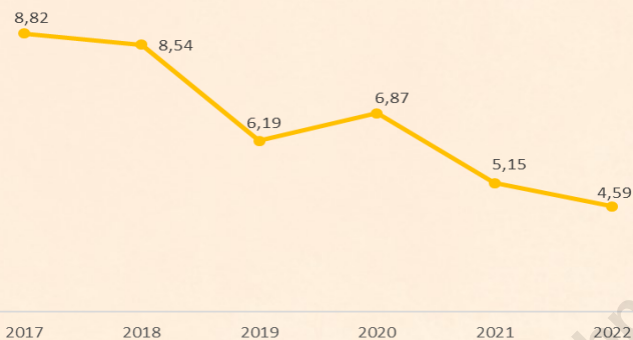
Gambar 2.1
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)
Sumatera Selatan, 2017-2023

TUJUAN 2



INDIKATOR 2.1.2

PREVALENSI PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT, BERDASARKAN PADA SKALA PENGALAMAN KERAWANAN PANGAN



Setiap tahunnya, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat terus mengalami penurunan. Pada tahun 2022, masih terdapat 4,59 persen penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat.

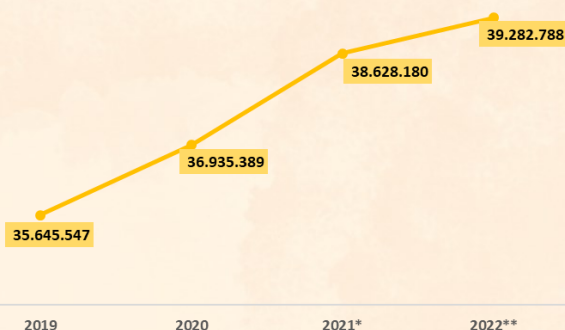
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 2.2

Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan Sumatera Selatan, 2017-2022

INDIKATOR 2.3.1.(A)

NILAI TAMBAH PERTANIAN PER TENAGA KERJA MENURUT KELAS USAHA TANI TANAMAN/PETERNAKAN/PERIKANAN/KEHUTANAN



Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menggambarkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Pada tahun 2022, nilai tambah pertanian per tenaga kerja mengalami kenaikan menjadi Rp 39.282.788

Catatan: * Menggunakan angka sementara Nilai Tambah Sektor Pertanian

** Menggunakan angka sangat sementara Nilai Tambah Sektor Pertanian

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Data Nilai Tambah Pertanian

Gambar 2.3

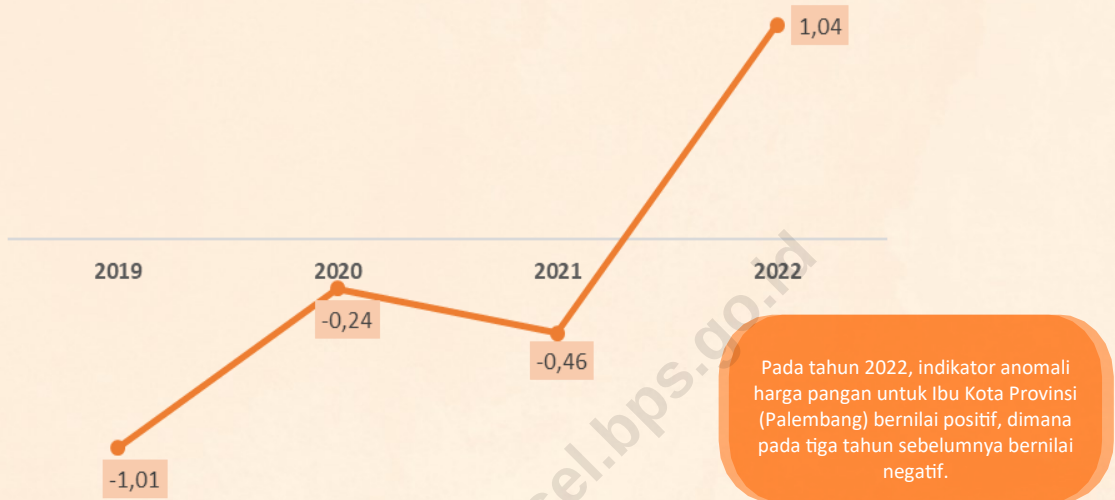
Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutanan (Rp/Tenaga Kerja) Sumatera Selatan, 2019-2022



TUJUAN 2

INDIKATOR 2.C.1

INDIKATOR ANOMALI HARGA PANGAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, Anomali Harga Pangan

Gambar 2.4
Indikator Anomali Harga Pangan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan (Palembang), 2019-2022

TUJUAN 3

**Menjamin Kehidupan yang Sehat dan
Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh
Penduduk Semua Usia**

<https://sumber.go.id>



TUJUAN 3

Kehidupan Sehat dan Sejahtera

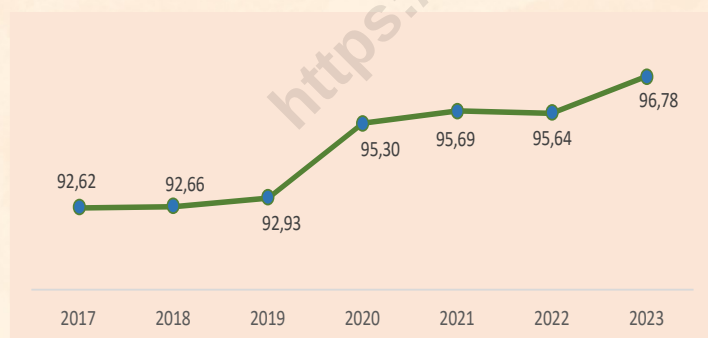
Bonus demografi yang diprediksi akan terjadi di tahun 2020 hingga 2030 mempunyai tantangan yang cukup besar di bidang kesehatan. Kondisi struktur penduduk pada saat itu lebih banyak didominasi oleh penduduk usia produktif. Disamping pertambahan penduduk usia produktif, kondisi di masyarakat juga diwarnai dengan penambahan penduduk usia lanjut yang menjadi permasalahan tersendiri. Angka harapan hidup di Sumatera Selatan memang mengalami peningkatan. Tetapi, ancaman penyakit tidak menular yang prevalensinya mengalami peningkatan tidak bisa dianggap remeh.

TARGET 3.1

PADA TAHUN 2030, MENGURANGI RASIO ANGKA KEMATIAN IBU HINGGA KURANG DARI 70 PER 100.000 KELAHIRAN

INDIKATOR 3.1.2*

PROPORSI PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA : (A) DITOLONG OLEH TENAGA KESEHATAN TERLATIH; (B) DI FASILITAS KESEHATAN



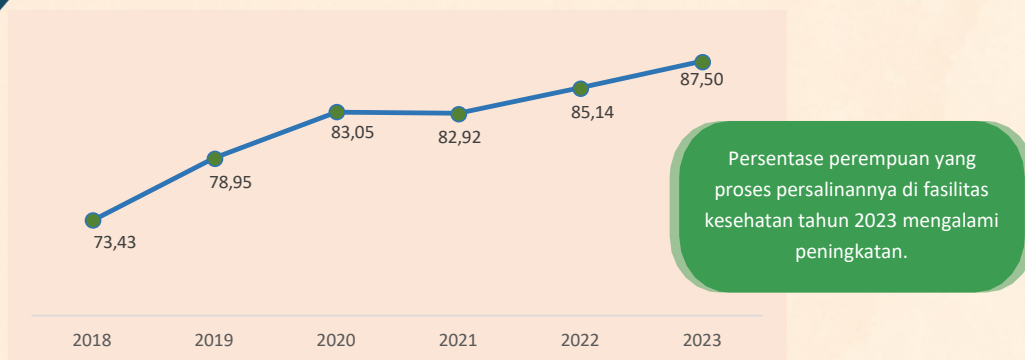
Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.1
Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun
yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong
oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2023

Tenaga Kesehatan memiliki peran penting dalam mencegah kematian ibu saat proses melahirkan. Selama kurun waktu 7 tahun terakhir, proporsi perempuan yang proses melahirkannya ditolong oleh kesehatan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 96,78 persen pada tahun 2023.

Dalam rentang waktu tahun 2017-2023, proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sudah berada di angka lebih dari 90 persen.

TUJUAN 3

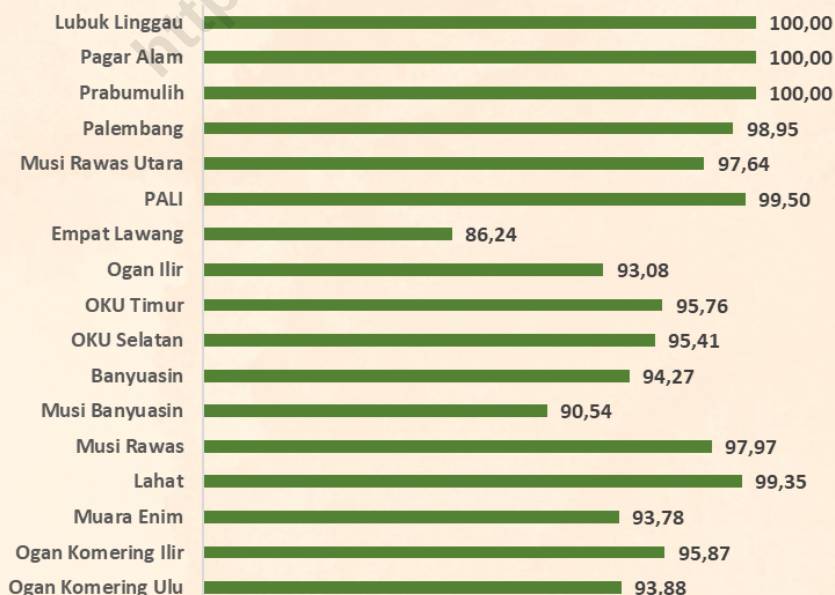


Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 3.2

Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan

Rentang waktu antara tahun 2017 sampai 2020, persentase perempuan yang proses persalinannya di fasilitas kesehatan di Sumatera Selatan mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan menjadi 82,92 persen dan kembali meningkat di tahun 2022 dan 2023. Nilai persentase tahun 2023 sebesar 87,50, artinya pemenuhan fasilitas kesehatan telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun begitu prestasi ini masih perlu ditingkatkan di masa mendatang.



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 3.3

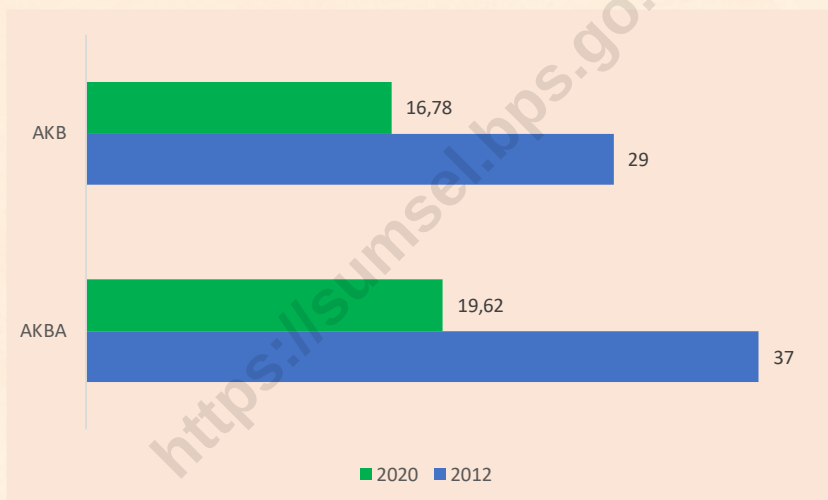
Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2022



TUJUAN 3

Capaian nilai indikator ini sudah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai di atas 90 persen kecuali Kabupaten Empat Lawang hanya mencapai 86 persen. Sedangkan untuk wilayah perkotaan capaian indikator ini di tahun 2022 telah mencapai 100 persen.

INDIKATOR 3.2.1 **A) ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP;**
(B) ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 3.4
Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 Kelahiran Hidup serta Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup, 2012 dan 2020

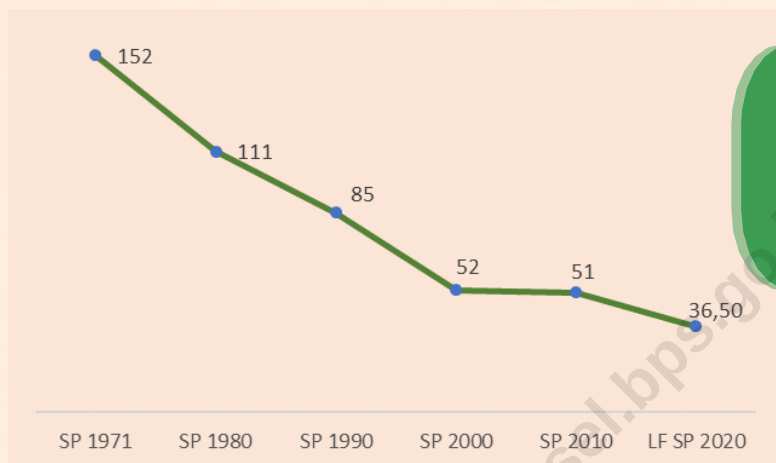
Angka Kematian Balita turun dari 37 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 19,62 per 1000 kelahiran hidup pada Long Form SP2020. Terjadi penurunan Angka Kematian Bayi yang cukup signifikan. Angkanya menurun dari 29 kematian pada tahun 2012 menjadi 16,78 pada Long Form SP2020.

TUJUAN 3



INDIKATOR 3.7.2

ANGKA KELAHIRAN REMAJA (UMUR 15-19 TAHUN) PER 1000 PEREMPUAN DI KELOMPOK UMUR YANG SAMA



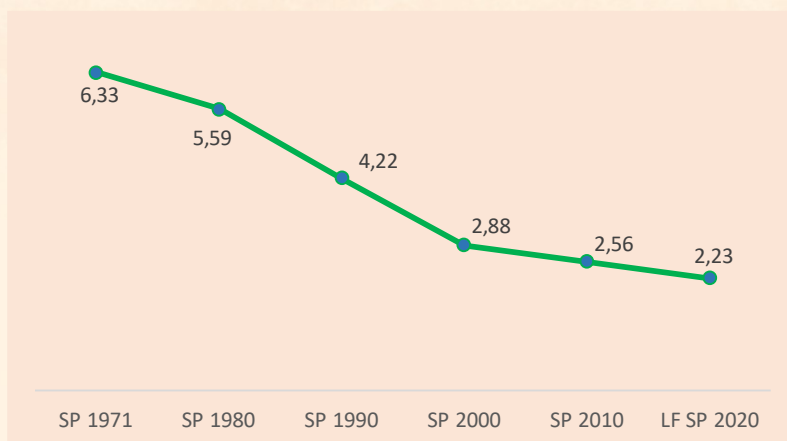
Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun hasil LF SP 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil SP 2010, yakni sebesar 36,50 kelahiran per 1000 perempuan umur 15-19 tahun.

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.5

Angka Kelahiran Remaja (Umur 15-19 tahun) Per 1000 Perempuan di Kelompok Umur Yang Sama (ASFR) Provinsi Sumatera Selatan, SP1971-Long Form SP2020

INDIKATOR 3.7.2 (A) TOTAL FERTILITY RATE (TFR)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.6

Total Fertility Rate Provinsi Sumatera Selatan, SP 1971-LF SP2020



TUJUAN 3

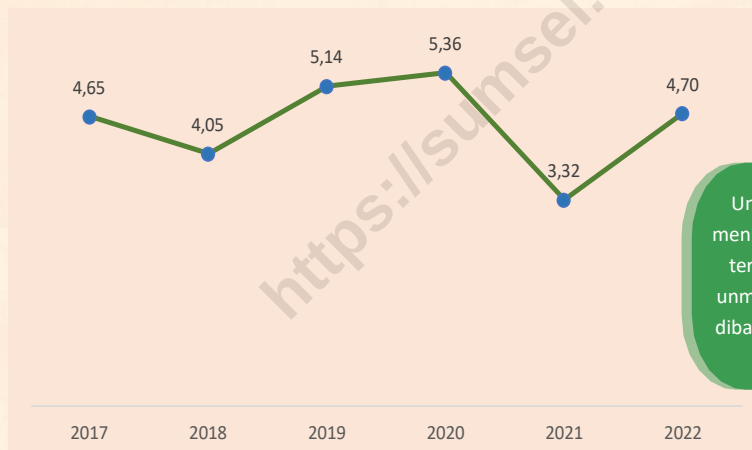
Jika dibandingkan dengan tahun 2010, TFR hasil long form SP2020 mengalami penurunan sebesar 0,33 poin menjadi 2,23. Artinya pada tahun 2020 perempuan usia 15-49 tahun rata-rata mempunyai 2-3 anak pada masa subur.

TARGET 3.8

MENCAPAI CAKUPAN KESEHATAN UNIVERSAL, TERMASUK PERLINDUNGAN RISIKO KEUANGAN, AKSES TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BAIK, DAN AKSES TERHADAP OBAT-OBATAN DAN VAKSIN DASAR YANG AMAN, EFEKTIF, BERKUALITAS, DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA ORANG

INDIKATOR 3.8.1 (A)

UNMET NEED PELAYANAN KESEHATAN



Unmet need adalah indikator yang menunjukkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Pada tahun 2022, angka unmet need mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya menjadi 4,70 persen.

Sumber : Badan Pusat Statistik

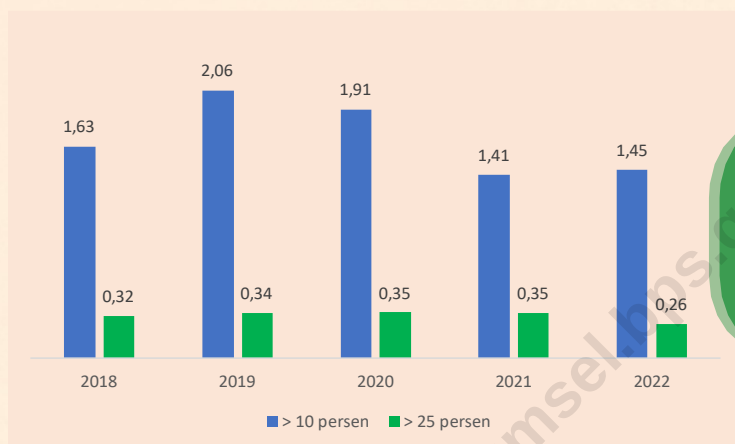
Gambar 3.7
Unmet Need Pelayanan Kesehatan, 2017-2022

TUJUAN 3



INDIKATOR 3.8.2

PROPORSI POPULASI DENGAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA YANG BESAR UNTUK KESEHATAN SEBAGAI BAGIAN DARI TOTAL PENGELUARAN RUMAH TANGGA ATAU PENDAPATAN



Selama lima tahun terakhir, proporsi populasi dengan pengeluaran Kesehatan yang besar mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, penduduk dengan pengeluaran kesehatan > 25 persen tercatat sebesar 0,26 persen.

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.8

Proporsi Populasi Dengan Pengeluaran Rumah Tangga Yang Besar Untuk Kesehatan Sebagai Bagian Dari Total Pengeluaran Rumah Tangga atau Pendapatan

INDIKATOR 3.A.1

PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN

Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun mengalami penurunan di tahun 2022, yaitu sebesar 30,49 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.9

Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun

TUJUAN 4

**Menjamin Kualitas Pendidikan
yang Inklusif dan Merata
serta Meningkatkan Kesempatan
Belajar Sepanjang Hayat
untuk Semua**



TUJUAN 4

Pendidikan Berkualitas

Salah satu faktor utama dan terpenting dalam pembangunan berkelanjutan adalah pendidikan. Menurut Presiden Joko Widodo, dalam beberapa kesempatan mengungkapkan pentingnya sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan karakter bagi anak bangsa. SDM dapat memajukan suatu negara asalkan SDM tersebut harus memiliki pengetahuan dan teknologi serta kreativitas dan inovasi. Selain itu, pendidikan memberikan pelajaran mengenai daya juang dan membangun watak anak bangsa dengan memberikan arti kejujuran, kebersamaan, kesantunan, nilai-nilai, dan budi pekerti kepada anak-anak bangsa (Kemdikbud, 2018).

TARGET 4.1

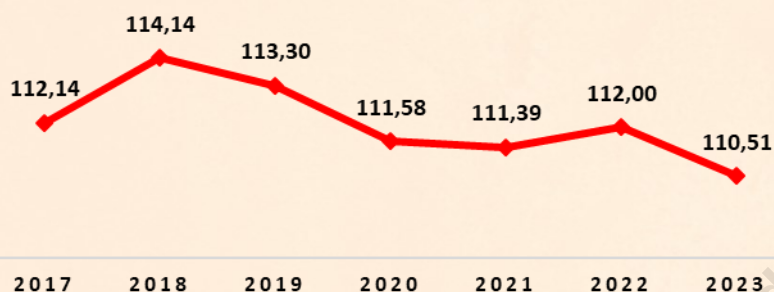
PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TANPA DIPUNGUT BIAYA, SETARA, DAN BERKUALITAS, YANG MENGARAH PADA CAPAIAN PEMBELAJARAN YANG RELEVAN DAN EFEKTIF

INDIKATOR 4.1.1.(D) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/SEDERAJAT

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat di Sumatera Selatan nilainya berada di atas angka 100 persen, Nilai APK SD di Sumatera Selatan yang berada di atas angka 100 persen menunjukkan bahwa populasi murid SD sederajat di Sumatera Selatan mencakup anak di luar batas usia sekolah SD sederajat. Beberapa penyebab yang mungkin terjadi antara lain pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah atau bisa juga disebabkan pengulangan kelas. Selain itu nilai APK SD sederajat yang nilainya di atas 100 persen juga menunjukkan bahwa Sumatera Selatan mampu menampung penduduk usia sekolah SD sederajat lebih dari target yang sesungguhnya.

APK SD sederajat di Provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 2017 hingga 2023 nilainya selalu di atas 100. Sempat mengalami penurunan nilai di tahun 2019 sampai 2021, pada tahun 2022 nilai APK SD sederajat Sumsel meningkat kembali dan pada tahun 2023 menurun menjadi sebesar 110,51 persen.

TUJUAN 4



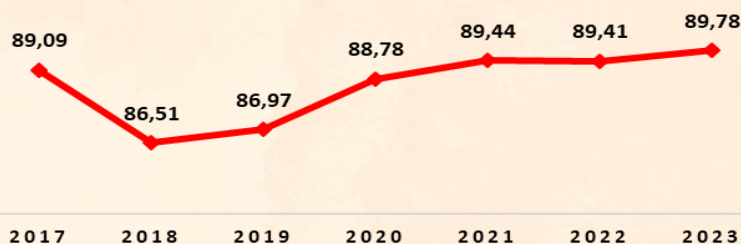
APK SD sederajat berada di atas 100 persen

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.1
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat (persen), 2017-2023

INDIKATOR 4.1.1.(E) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/SEDERAJAT

Angka Selama tahun 2017-2023, APK SMP sederajat di Sumatera Selatan lebih rendah dibandingkan APK SD sederajat. Artinya, partisipasi penduduk untuk melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP sederajat lebih rendah dibandingkan pada jenjang pendidikan SD. APK SMP/MTs/sederajat di Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 89,78 persen lebih tinggi dari tahun 2022 yang nilainya 89,41 persen.



Selama tahun 2017-2023, APK SMP sederajat lebih rendah dibandingkan APK SD sederajat

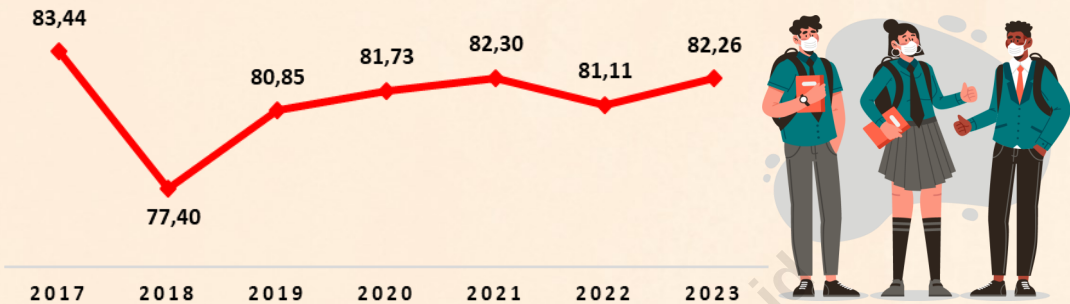
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Sederajat (persen), 2017-2023



TUJUAN 4

INDIKATOR 4.1.1.(F) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/SMK/MA/SEDERAJAT



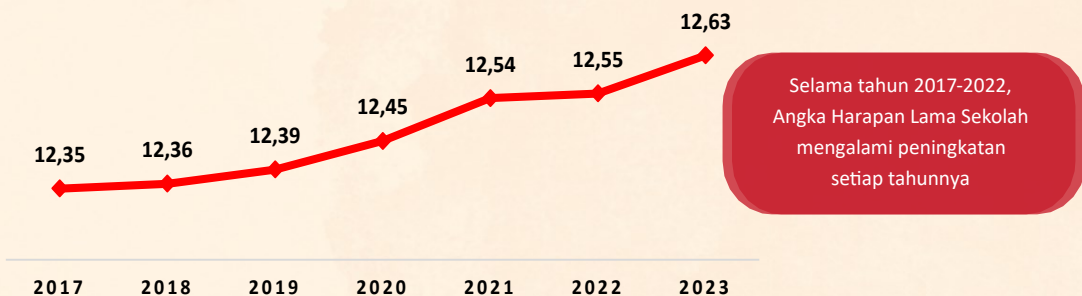
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat (persen), 2017-2023

Nilai APK SMA/SMK/MA/ sederajat di Sumatera Selatan lebih rendah jika dibandingkan nilai APK SMP sederajat dan SD sederajat. Ini bisa berarti semakin tinggi jenjang pendidikan akan semakin berkurang partisipasi masyarakat bersekolah pada jenjang tersebut.

Berbeda dengan APK SD sederajat Sumatera Selatan yang mengalami penurunan di tahun 2023, APK SMA sederajat di tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022.

INDIKATOR 4.1.1.(H) ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH



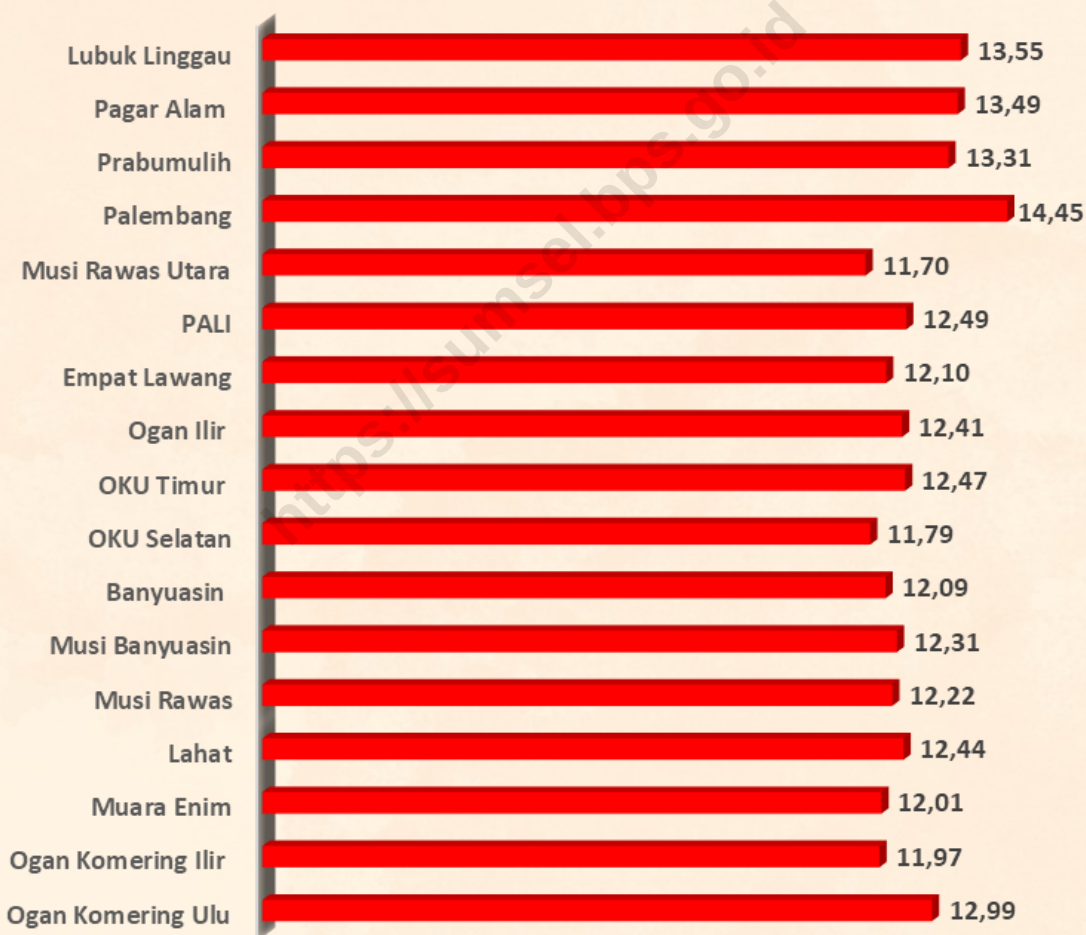
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.4
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun), 2017-2023

TUJUAN 4



Angka harapan lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada gambar 4.5 dimana diketahui bahwa Kota Palembang memiliki nilai tertinggi angka harapan lama sekolah sebesar 14,45 tahun atau setara Diploma II sedangkan yang terendah di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 11,70 tahun atau setara kelas dua SLTA/SMK. Angka harapan lama sekolah di Sumatera Selatan di wilayah kota lebih tinggi dibanding kabupaten dan semua kabupaten/kota memiliki angka harapan lama sekolah di atas sebelas tahun.



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

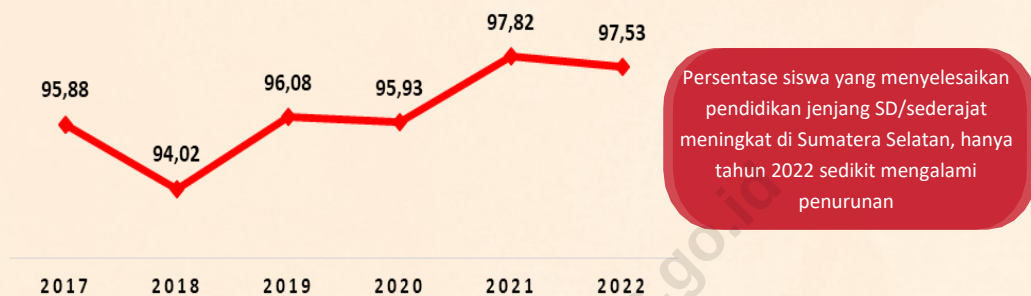
Gambar 4.5
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota, 2023



TUJUAN 4

INDIKATOR 4.1.2*

TINGKAT PENYELESAIAN PENDIDIKAN JENJANG SD/SEDERAJAT,

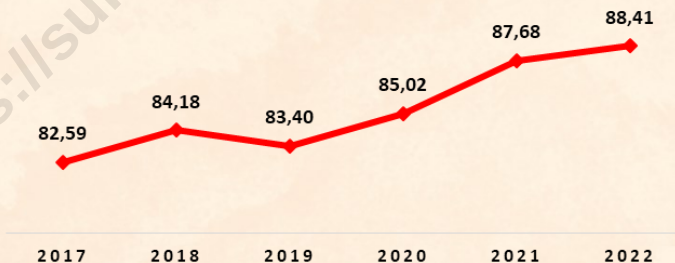


Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.6

Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/ sederajat, 2017-2022

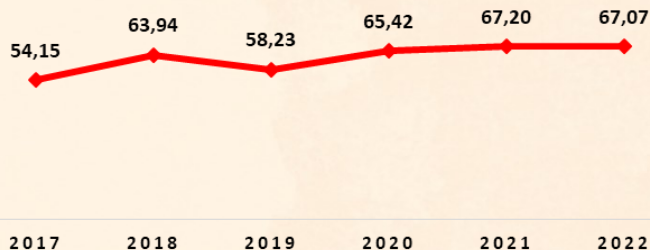
Selama tahun 2017-2022, Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/ sederajat secara tahun ke tahun meningkat di Sumatera Selatan, hanya tahun 2019 terjadi penurunan



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.7

Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/ sederajat, 2017-2022



Selama tahun 2017-2022 Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/ sederajat secara tahun ke tahun meningkat di Sumatera Selatan, hanya tahun 2019 terjadi penurunan

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

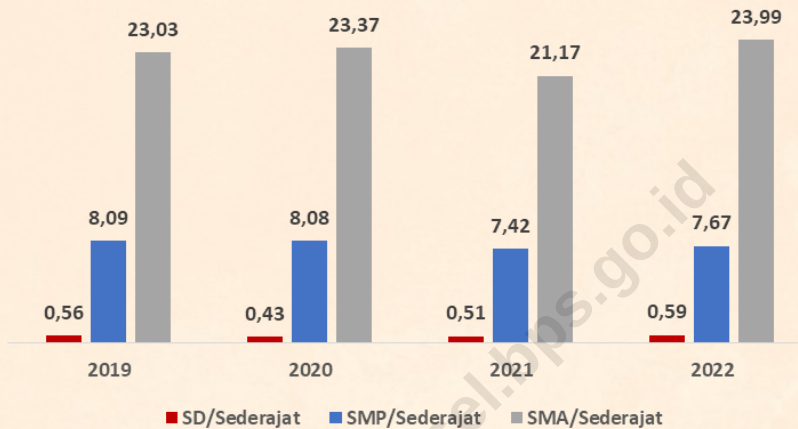
Gambar 4.8

Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/ sederajat, 2017-2022

TUJUAN 4



INDIKATOR 4.1.2.(A) ANGKA ANAK TIDAK SEKOLAH JENJANG: (A)PAUD/SEDERAJAT; (B)SD/

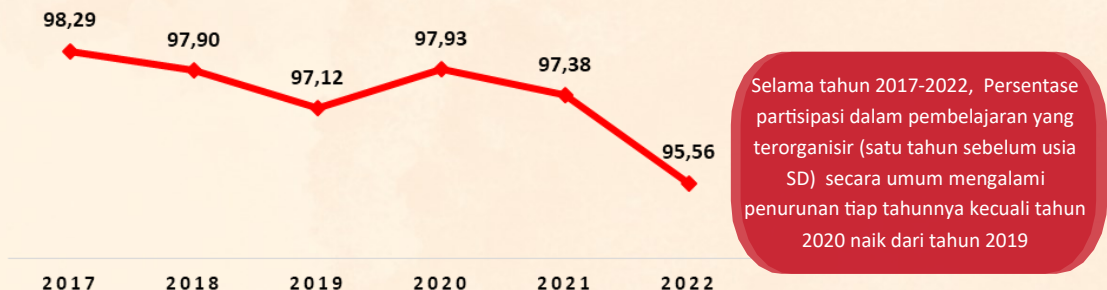


Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.9

Angka anak tidak sekolah jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat), 2019-2022

INDIKATOR 4.2.2 TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMBELAJARAN YANG TEROGANISIR (SATU TAHUN SEBELUM USIA SEKOLAH DASAR), MENURUT JENIS



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.10

Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), 2019-2022



TUJUAN 4

TARGET 4.3

PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES YANG SAMA BAGI SEMUA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI, TERHADAP PENDIDIKAN TEKNIK, KEJURUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI, TERMASUK UNIVERSITAS, YANG TERJANGKAU DAN BERKUALITAS

INDIKATOR 4.3.1.(A)

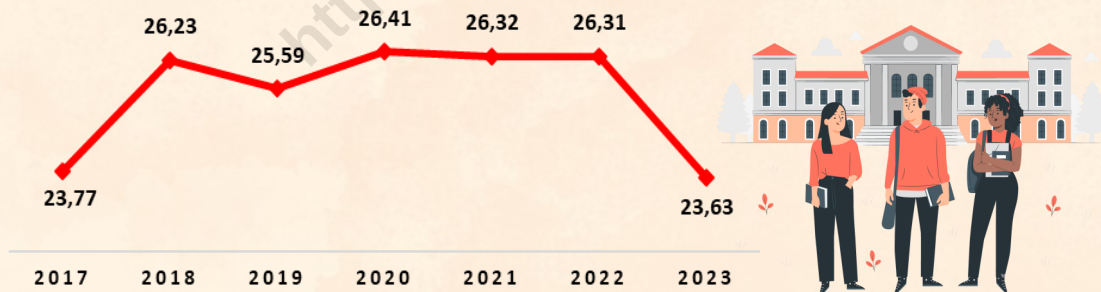
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/SMK/MA/SEDERAJAT

Sama dengan indikator 4.1.1(F) sehingga penjelasannya dapat dilihat pada indikator 4.1.1(F).

INDIKATOR 4.3.1.(B)

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PERGURUAN TINGGI (PT)

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada level pendidikan perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan masih perlu ditingkatkan. Capaian nilai APK perguruan tinggi tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 23,63 persen, masih di bawah nilai APK Nasional yang sebesar 31,45 persen.



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.11
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (tahun), 2017-2023

TUJUAN 4

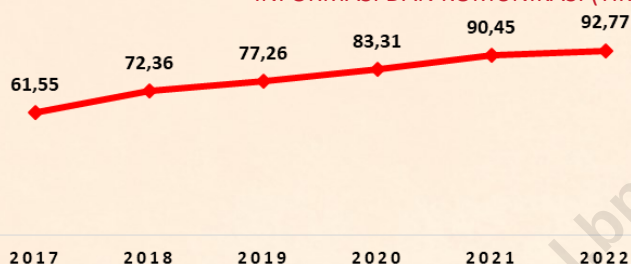


TARGET 4.4

PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN JUMLAH PEMUDA DAN ORANG DEWASA YANG MEMILIKI KETERAMPILAN YANG RELEVAN, TERMASUK KETERAMPILAN TEKNIK DAN KEJURUAN UNTUK PEKERJAAN, PEKERJAAN YANG LAYAK DAN KEWIRAUSAHAAN

INDIKATOR 4.4.1

PROPORSI REMAJA DAN DEWASA DENGAN KETERAMPILAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)



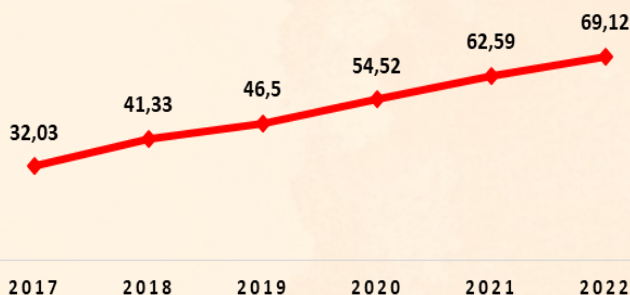
Lebih dari 90 persen penduduk usia 15-24 tahun di Sumatera Selatan tahun 2022 terampil dalam penggunaan TIK

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.12

Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 2017-2022

Keterampilan TIK menentukan penggunaan yang efektif dari produk-produk teknologi komputer. Kurangnya keterampilan ini bisa menjadi hambatan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari kemajuan TIK. Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berusia 15-24 tahun sudah banyak yang terampil menggunakan TIK, terlihat dari capaian indikator ini yang naik signifikan. Pada tahun 2017, capainnya baru mencapai 61,55 persen dan naik menjadi 92,77 persen di tahun 2022. Begitupun dengan proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.13

Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-59 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 2017-2022



TUJUAN 4

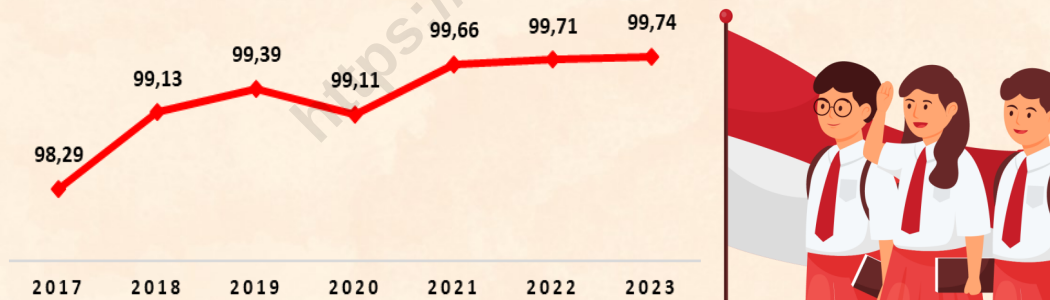
TARGET 4.5

PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN DISPARITAS GENDER DALAM PENDIDIKAN, DAN MENJAMIN AKSES YANG SAMA UNTUK SEMUA TINGKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJURUAN, BAGI MASYARAKAT RENTAN TERMASUK PENYANDANG CACAT, MASYARAKAT PENDUDUK ASLI, DAN ANAK-ANAK DALAM KONDISI RENTAN

INDIKATOR 4.5.1*

RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI [1] SD/MI/SEDERAJAT; [2] SMP/MTS/SEDERAJAT; 3]SMA/SMK/MA/SEDERAJAT; DAN RASIO ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI [4] PERGURUAN TINGGI

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang SD/MI/ sederajat di Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 99,74 persen. Nilai indikator yang berada di bawah 100 persen menunjukkan bahwa penduduk laki-laki umur 7-12 tahun yang bersekolah tepat di jenjang SD/MI/ sederajat lebih besar dibandingkan penduduk perempuan pada kelompok umur yang sama.



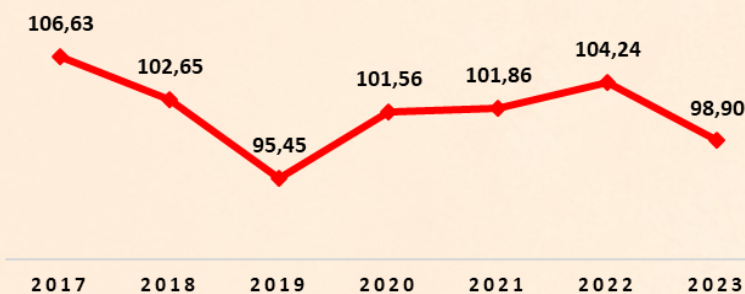
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.14

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SD/MI/ Sederajat, 2017-2023

Hampir sama dengan level Pendidikan SD, untuk level Pendidikan SMP/MTS/ sederajat nilai APM perempuan/laki-laki tahun 2023 sebesar 98,90 persen masih berada di bawah 100 persen. Ini berarti penduduk perempuan umur 13-15 tahun yang bersekolah tepat di jenjang SMP/MTS/ sederajat lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki pada kelompok umur yang sama. Jika dilihat pada kurun waktu 2017-2023, rasio APM perempuan/laki-laki jenjang SMP sederajat, rata-rata sudah di atas 100 persen, kecuali tahun 2019 dan 2023.

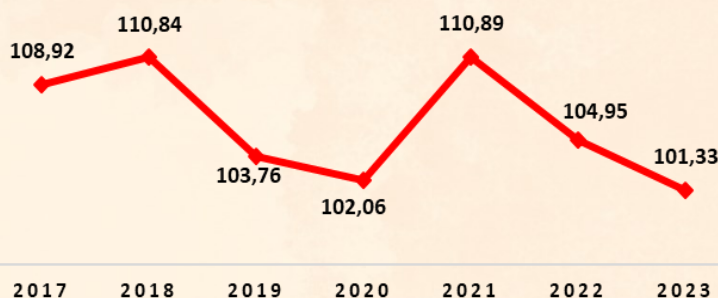
TUJUAN 4



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.15
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SMP/MTS/ Sederajat, 2017-2023

Rasio APM perempuan/ laki-laki pada jenjang SMA sederajat di Sumatera Selatan bernilai lebih dari 100 yang mencerminkan partisipasi penduduk perempuan umur 16-18 tahun untuk bersekolah tepat pada jenjang SMA sederajat lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2023 rasio APM SMA sederajat perempuan terhadap laki-laki sebesar 101,33 persen, turun dari tahun 2022 yang sebesar 104,95 persen. Penduduk laki-laki diduga memiliki kecenderungan untuk mencari nafkah atau bekerja sehingga memilih keluar dari sekolah sehingga partisipasi penduduk laki-laki lebih rendah.



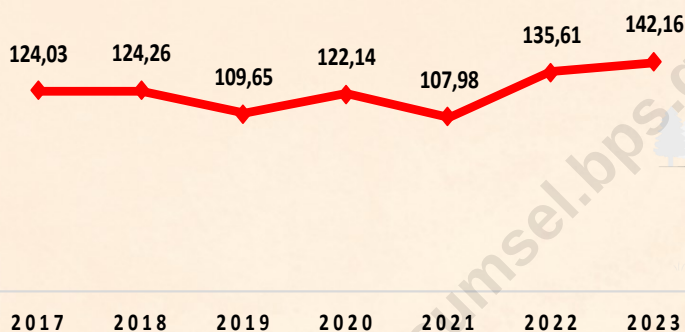
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.16
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/ Sederajat, 2017-2023



TUJUAN 4

Pada jenjang perguruan tinggi, rasio APK perempuan/laki-laki juga bernilai lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan penduduk perempuan lebih tinggi partisipasi untuk bersekolah di Perguruan Tinggi dibandingkan laki-laki. Perempuan dapat mencapai pendidikan yang lebih tinggi, artinya kesetaraan akses pendidikan tinggi bagi perempuan dengan laki-laki sudah terlihat. Dengan pendidikan yang tinggi, perempuan kini akan lebih terbuka untuk menentukan status dan kedudukannya dalam masyarakat.



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.17
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki
Jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, 2017-2023

TARGET 4.6

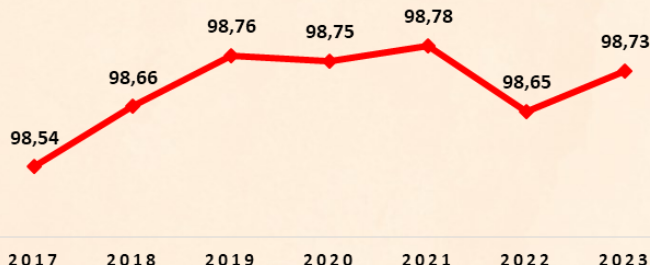
PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA REMAJA DAN PROPORSI KELOMPOK DEWASA TERTENTU, BAIK LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN, MEMILIKI KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI

INDIKATOR 4.6.1(A)

PERSENTASE ANGKA MELEK AKSARA PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN

Angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 98,73 persen. Ini artinya masih terdapat 1,27 persen penduduk umur ≥ 15 tahun di Sumatera Selatan yang masih belum melek aksara. Capaian indikator ini mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2022 nilai capaian indikator ini sebesar 98,65 persen.

TUJUAN 4

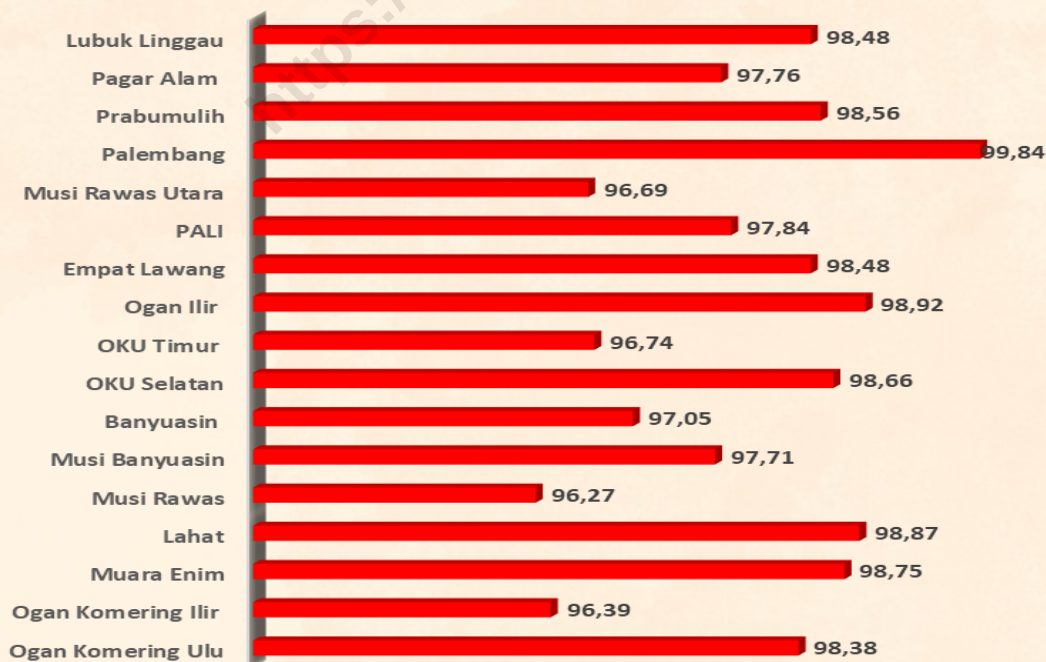


Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.18

Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun (persen), 2017-2023

Persentase Angka Melek Aksara tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan tertinggi yaitu Kota Palembang sebesar 99,84 persen dan terendah Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu 97,06 persen. Kabupaten/kota dengan nilai Angka Melek Aksara penduduk Umur ≥ 15 tahun di bawah nilai Provinsi 98,65 persen yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Banyuasin, OKU Timur, Banyuasin, OKU, dan Empat Lawang.



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.19

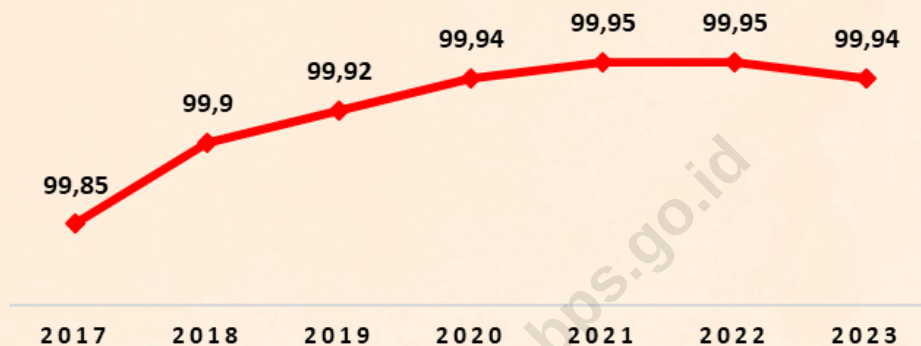
Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Kabupaten/Kota (persen), 2022



TUJUAN 4

INDIKATOR 4.6.1.(B)

PERSENTASE ANGKA MELEK AKSARA PENDUDUK UMUR 15-24 TAHUN

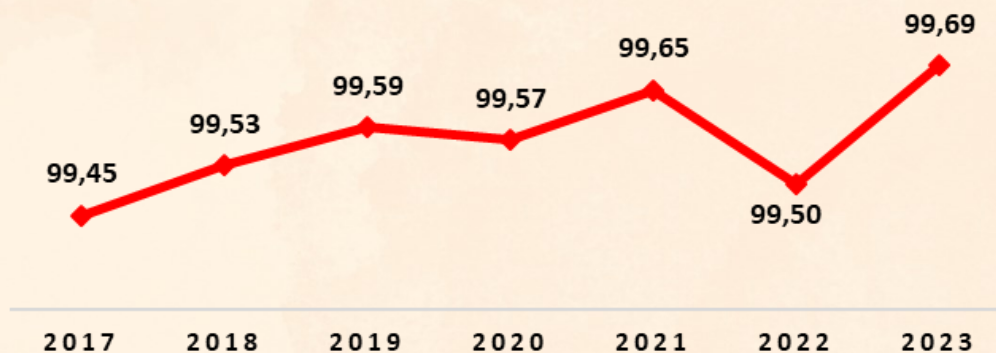


Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.20

Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun (persen), 2017-2023

Dibandingkan penduduk umur 15 tahun ke atas, pada tahun 2023 persentase Angka Melek Aksara penduduk umur 15-24 tahun di Sumatera Selatan mencatatkan hasil yang lebih baik yaitu sebesar 99,94 persen. Sedangkan untuk penduduk Sumatera Selatan umur 15-59 tahun pada tahun 2023 nilai melek aksara sebesar 99,69 persen.



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.21

Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-59 Tahun (persen), 2017-2023

TUJUAN 5

**Mencapai Kesetaraan Gender dan
Memberdayakan Kaum Perempuan**

<https://sumsugenggo.id>



TUJUAN 5

Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan yang setara dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penduduk laki-laki dan perempuan (Kementerian PPPA, 2017). Tercapainya kondisi kesetaraan gender dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi angka kemiskinan, dan dapat menjalankan roda pembangunan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, mempromosikan kesetaraan gender merupakan bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang) baik laki-laki maupun perempuan dalam rangka pengentasan diri dari jurang kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tidak hanya penting dari sisi moralitas dan keadilan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender juga dianggap sangat penting dan relevan bagi perekonomian sebuah negara (Kementerian Keuangan, 2019).

TARGET 5.3

MENGHAPUSKAN SEMUA PRAKTIK BERBAHAYA, SEPERTI PERKAWINAN USIA ANAK, PERKAWINAN DINI DAN PAKSA, SERTA SUNAT PEREMPUAN

INDIKATOR 5.3.1*

PROPORSI PEREMPUAN UMUR 20-24 TAHUN YANG BERSTATUS KAWIN ATAU BERSTATUS HIDUP BERSAMA SEBELUM UMUR 15 TAHUN DAN SEBELUM UMUR 18 TAHUN

2017		13,29
2018		12,07
2019		13,53
2020		13,44
2021		12,24
2022		11,42



Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau hidup bersama pertamanya sebelum umur 18 tahun mengalami penurunan.

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR (Susenas KOR)

Gambar 5.1

Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun (persen), 2017-2022

TUJUAN 5

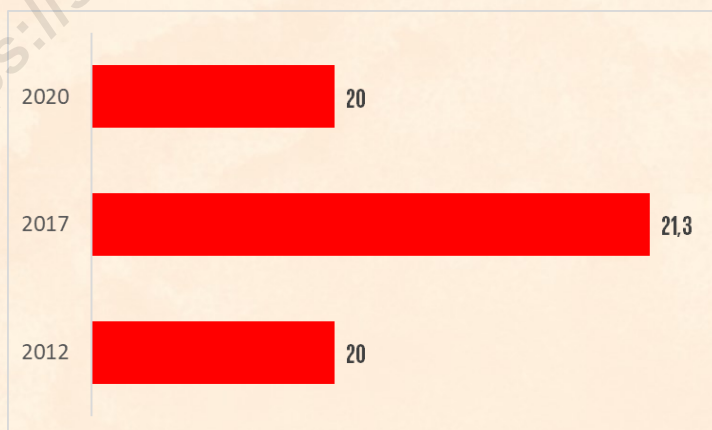


Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jelas mengatur batasan umur laki-laki dan perempuan untuk kawin/menikah. Pernikahan di usia dini dikhawatirkan akan memberikan risiko kesehatan terhadap perempuan dan memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia.

Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Sumatera Selatan menunjukkan tren yang menurun selama 2017-2018 dan sedikit meningkat di tahun 2019, kemudian menurun kembali di tahun 2020 hingga 2022. Tahun 2022, sekitar 11,42 persen perempuan umur 20-24 tahun sudah kawin/ menikah atau hidup bersama sebelum berumur 18 tahun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 12,24 persen. Masih terdapat perempuan yang menikah sebelum berumur 18 tahun perlu terus diperhatikan mengingat pemerintah telah merevisi batasan umur seseorang bisa melangsungkan perkawinan minimal berumur 19 tahun.

INDIKATOR 5.3.1 (A)

MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 25-49 TAHUN



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR

Gambar 5.2

Median Usia Kawin Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 25-49

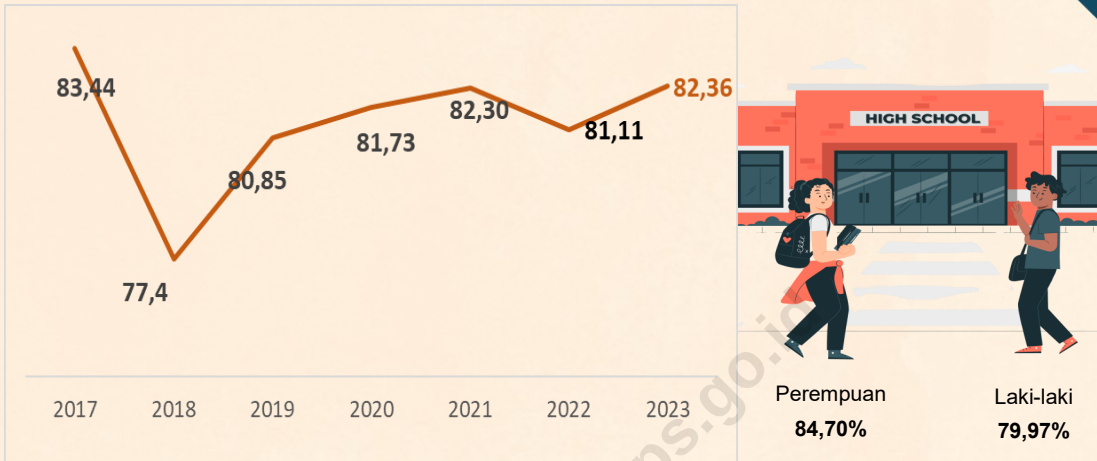
Medan umur kawin pada tahun 2020 sebesar 20 menurun dari tahun 2017 yang sebesar 21,3. Namun demikian, median umur kawin sudah selaras dengan batasan minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 19 tahun.



TUJUAN 5

INDIKATOR 5.3.1 (C)

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/SMK MA/ SEDERAJAT



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR

Gambar 5.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Sederajat (persen), 2017-2023

Pendidikan yang berkualitas dan dapat dinikmati semua, baik laki-laki maupun perempuan merupakan langkah penting mencapai tujuan pembangunan dan untuk mengurangi ketimpangan gender. Tren APK SMA/SMK/MA/ sederajat menurun di tahun 2018, kemudian meningkat kembali di tahun 2019 sampai 2021. Namun, di tahun 2022 menurun. Kemudian di tahun 2023, partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat tercatat meningkat menjadi sebesar 82,36 persen.

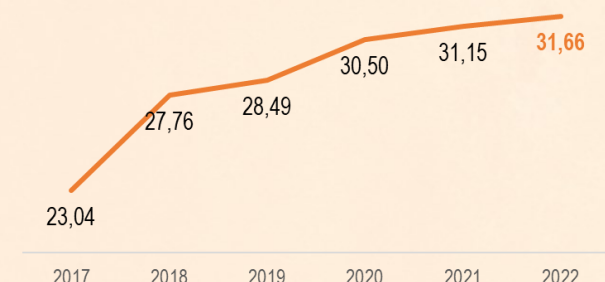
Berdasarkan jenis kelamin, APK SMA/SMK/MA/ sederajat laki-laki sebesar 79,97 persen, lebih kecil dari APK perempuan yang sebesar 84,70 persen di tahun 2023. APK yang bernilai di bawah 100 persen mencerminkan bahwa daya serap penduduk pada jenjang SMA sederajat belum optimal. Dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, hanya satu kabupaten/kota yang APK SMAnya diatas 100, yaitu Kota Prabumulih sebesar 105,75. Sedangkan, APK terendah di Kabupaten Empat Lawang sebesar 62,43. Seiring perkembangan era industri 4.0 yang berjalan saat ini, kita dihadapkan pada kondisi dimana kompetensi dan daya saing menjadi kunci untuk memasuki pasar kerja. Partisipasi pendidikan yang semakin tinggi diharapkan mampu menjembatani tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh sebab itu, partisipasi sekolah pada jenjang SMA sederajat harus terus didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

TUJUAN 5



INDIKATOR 5.5.2

PROPORSI PEREMPUAN YANG BERADA DI POSISI MANAGERIAL



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR

Secara umum, proporsi perempuan yang berada di posisi managerial relatif meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 5.4

Proporsi Perempuan Yang Berada di Posisi Managerial (persen), 2017-2022

TARGET 5.B

MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG MEMAMPUKAN, KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

INDIKATOR 5.B.1*

PROPORSI INDIVIDU YANG MENGUASAI/MEMILIKI TELEPON GENGAM



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR

Tingkat penguasaan atau kepemilikan telepon genggam mengalami peningkatan. Laki-laki lebih banyak yang menguasai/memiliki telepon genggam dibandingkan perempuan.

Gambar 5.5

Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam (persen), 2022-2023

Zaman yang disebut sebagai era digital sekarang ini, penggunaan alat komunikasi menjadi bagian yang penting dalam kehidupan. Salah satu alat komunikasi yang kerap ditemui dan dimiliki oleh masyarakat yaitu telepon genggam. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam tahun 2023 sebesar 66,23 persen, sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 66,25 persen.

TUJUAN 6

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua



TUJUAN 6

Air Bersih dan Sanitasi Layak

Target yang ingin dicapai pada tahun 2030 ini mensyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menikmati suatu standar kehidupan yang layak, mencakup akses merata pada air minum aman dan terjangkau, sanitasi dan kebersihan yang memadai, serta akses terhadap udara yang berkualitas.

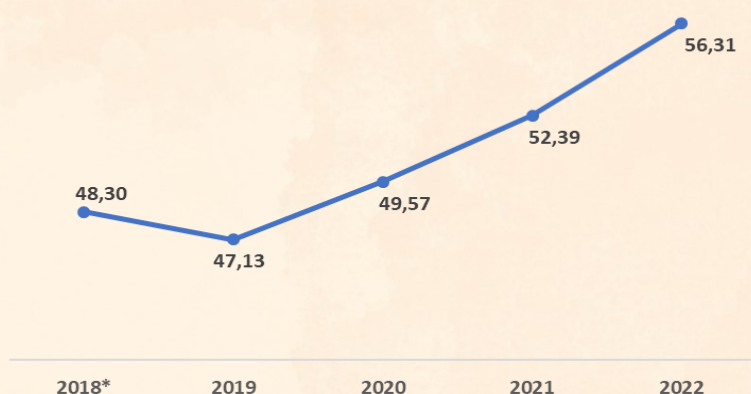
Ketersediaan air yang aman, mudah dijangkau dan berkelanjutan serta sanitasi yang bersih untuk semua merupakan tujuan yang harus dicapai pada tahun 2030. Dengan ketersediaan air dan sanitasi yang baik akan mendukung produktivitas dari masyarakat yang pada akhirnya secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi secara positif. Pada tahun 2022, umumnya Sumatera Selatan mengalami peningkatan pada tujuan ini. Fokus utama ada pada ketersediaan air bersih dan sanitasi layak yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar ini dapat berakibat fatal bagi kehidupan.

TARGET 6.1

PADA TAHUN 2030, MENCAPAI AKSES UNIVERSAL DAN MERATA TERHADAP AIR MINUM YANG AMAN DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA

INDIKATOR 6.1.1.*

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN LAYANAN AIR MINUM YANG DIKELOLA SECARA AMAN



Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun di tahun 2019 sempat mengalami penurunan

Keterangan: *Data Tahun 2018 merupakan Backcasting dengan metode baru (tahun 2019)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 6.1

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman, 2018-2022

TUJUAN 6



Komponen penyusun indikator air minum yang dikelola secara aman dari data Susenas terdiri dari air layak, terletak di dalam kawasan rumah, tersedia setiap dibutuhkan (tidak kekurangan air dalam 24 jam), dan memenuhi syarat kualitas kualitas air minum (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau).

Pada tahun 2019 ke atas, air minum layak yang merupakan komponen penyusun indikator air minum yang dikelola secara aman menggunakan konsep baru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019.

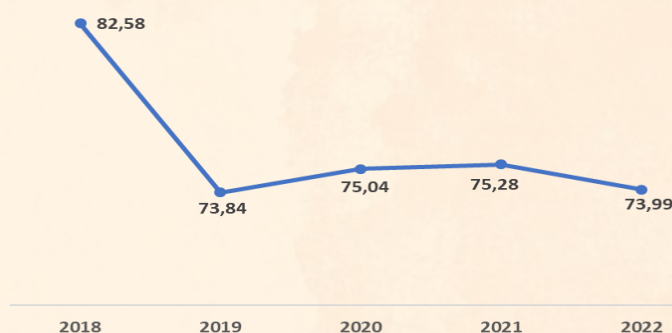
Air minum layak Sejak 2019: Rumah tangga memiliki sumber air minum utama yang berupa leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

TARGET 6.2

PADA TAHUN 2030, MENCAPAI AKSES TERHADAP SANITASI DAN KEBERSIHAN YANG MEMADAI DAN MERATA BAGI SEMUA, DAN MENGHENTIKAN PRAKTIK BUANG AIR SEMBARANGAN DI TEMPAT TERBUKA, MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS PADA KEBUTUHAN KAUM PEREMPUAN, SERTA KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN

INDIKATOR 6.21.*

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN LAYANAN SANITASI YANG DIKELOLA SECARA AMAN, TERMASUK FASILITAS CUCI TANGAN DENGAN AIR DAN SABUN



Pada tahun 2022, persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air sebesar 73,99 persen, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 75,28 persen.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 6.2

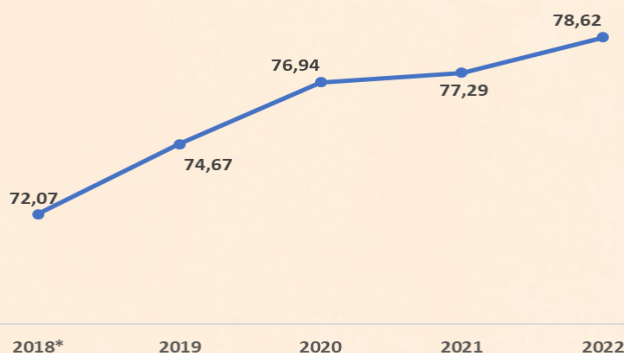
Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, 2018-2022



TUJUAN 6

INDIKATOR 6.2.1.*

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN LAYANAN SANITASI YANG DIKELOLA SECARA AMAN, TERMASUK FASILITAS CUCI TANGAN DENGAN AIR DAN SABUN



Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Keterangan: *Data Tahun 2018 merupakan Backcasting dengan metode baru (tahun 2019)

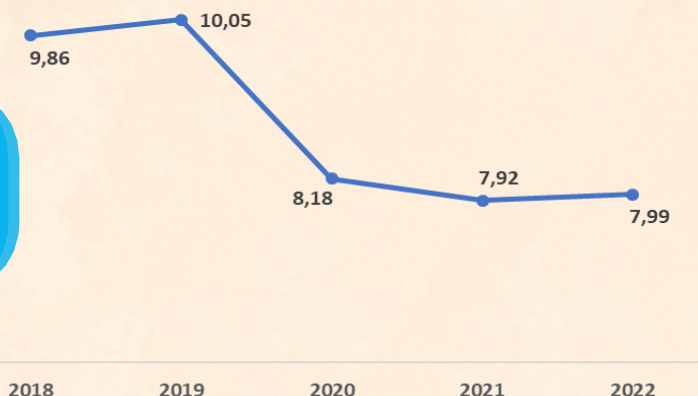
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 6.3

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, 2018-2022

Sanitasi Layak sejak tahun 2019: Dikatakan memiliki akses terhadap sanitasi layak jika rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.

Pada tahun 2022, masih terdapat 7,99 persen rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 6.4

Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka, 2018-2022

<https://sumsel.bps.go.id>

TUJUAN 7

**Menjamin akses energi yang terjangkau,
andal, berkelanjutan dan modern untuk
semua**



TUJUAN 7

Energi Bersih dan Terjangkau

Untuk mencapai Tujuan ke-7, yaitu energi bersih dan terjangkau, ketersediaan energi bersih dan terjangkau terus diupayakan oleh semua pihak. Terdapat lima target pada TPB/SDGs 7, antara lain: menjamin akses terhadap layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan, efisiensi energi, serta meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan.

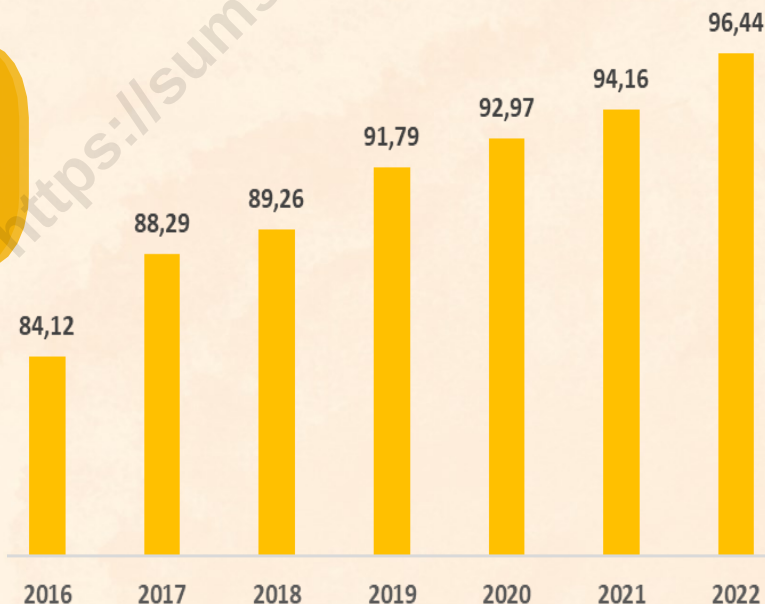
TARGET 7.1

PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES UNIVERSAL LAYANAN ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, DAN MODERN

INDIKATOR 7.1.2.B

RASIO PENGGUNAAN GAS RUMAH TANGGA

Rasio penggunaan gas di Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari tahun 2016-2022 yang mencapai 96,44 persen



Keterangan: Gas meliputi elpiji, gas kota, dan biogas

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 7.1
Rasio penggunaan gas rumah tangga, 2016-2022

TUJUAN 8

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua



TUJUAN 8

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan

PDRB per kapita tahun 2018-2022 di Sumatera Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sejalan dengan laju pertumbuhannya yang terus meningkat. Di tahun 2020, PDRB per kapita mengalami pertumbuhan melambat menjadi 0,53 persen, namun tahun 2021 pertumbuhan meningkat kembali menjadi 2,28 persen dan terus meningkat menjadi 3,94 persen di tahun 2022.

Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum di Sumatera Selatan di tahun 2018-2022 memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah menyebabkan kategori ini mengalami kontraksi hingga 7,21 persen. Di tahun 2021 kategori ini meningkat menjadi 4,43 persen, dan terus tumbuh sebesar 14,67 persen. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19, pertumbuhan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2019 mencapai 15,34 persen. Untuk itu kategori penyediaan akomodasi dan makan minum perlu diberdayakan karena dapat berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja. Namun selain jumlah kesempatan kerja yang meningkat, perlu diperhatikan juga kualitasnya yang diindikasikan dengan tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja.

TARGET 8.1

MEMPERTAHANKAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER KAPITA SESUAI DENGAN KONDISI NASIONAL DAN KHUSUSNYA SETIDAKNYA 7 PERSEN PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO PER TAHUN DI NEGARA BERKEMBANG

INDIKATOR 8.1.1

LAJU PERTUMBUHAN PDRB PER KAPITA



Sumber : Badan Pusat Statistik

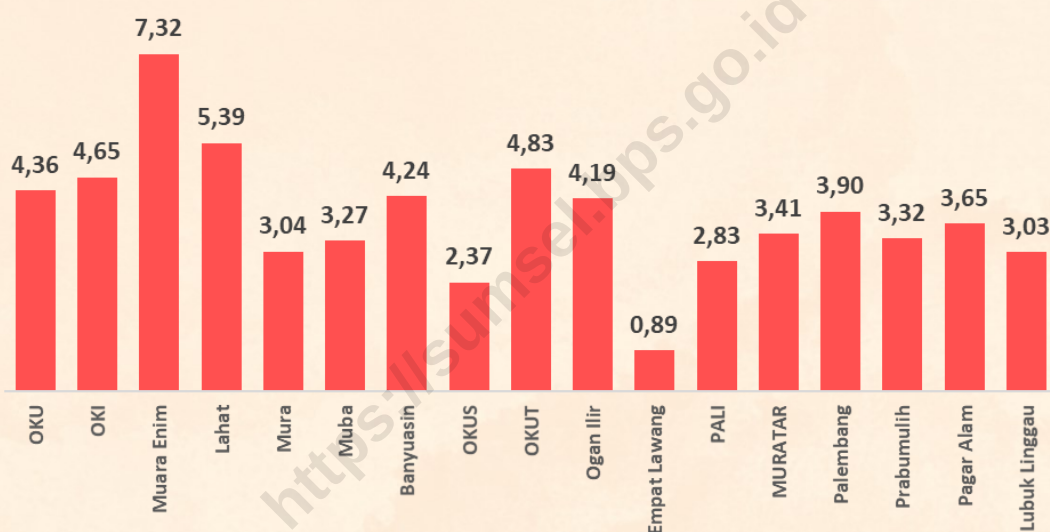
Gambar 8.1

Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen), 2018-2022

TUJUAN 8



Selama periode 2018-2022 rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 mencapai 3,11 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebesar 4,70 persen. Sementara, nilai PDRB per Kapita Sumatera Selatan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang melambat menjadi 0,53 persen. Pasca pemulihan COVID-19, pada tahun 2021, PDRB per kapita atas dasar harga konstan tumbuh sebesar 2,28 persen. Sementara pada tahun 2022, PDRB per kapita atas dasar harga konstan sebesar 3,94 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 8.2
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2022

Bila diamati menurut kabupaten/kota di Sumatera Selatan, laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan di seluruh kabupaten/kota mengalami pertumbuhan. Kabupaten Empat Lawang mengalami pertumbuhan terkecil yaitu sebesar 0,89 persen. Pertumbuhan tertinggi di tempati oleh Kabupaten Muara Enim (7,32 persen), Kabupaten Lahat (5,39 persen), dan Kabupaten OKU Timur (4,83 persen). Pendapatan perkapita yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan. PDRB per kapita Sumatera Selatan menunjukkan kenaikan dalam kurun waktu 2018-2022.



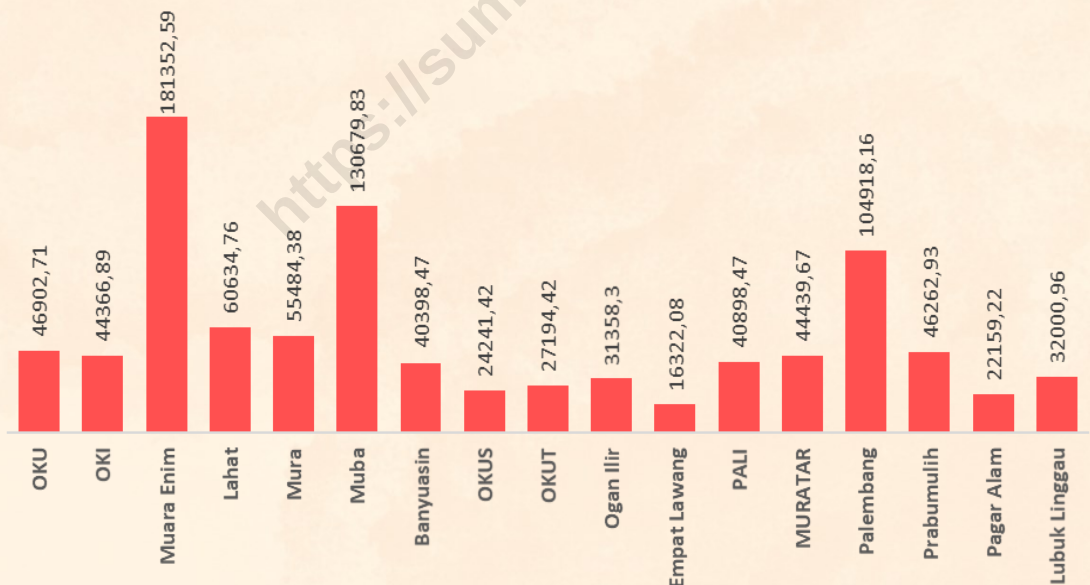
TUJUAN 8

Pada tahun 2022, PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku mengalami kenaikan hingga mencapai 68,34 juta rupiah.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 8.3
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah), 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 8.4
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (ribu rupiah), 2022

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tertinggi tahun 2022 di tempati oleh Kabupaten Muara Enim, Kota Palembang, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku terkecil tahun 2022 di tempati oleh Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten OKU Selatan.

TUJUAN 8

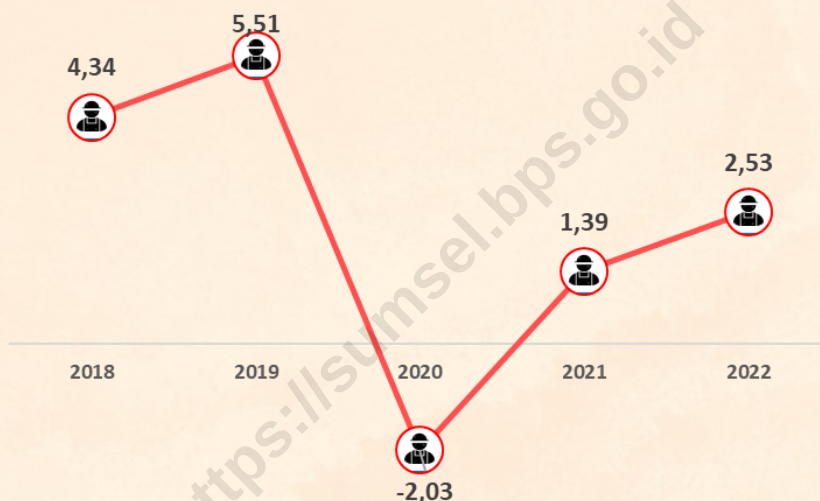


TARGET 8.2

MENCAPAI TINGKAT PRODUKTIVITAS EKONOMI YANG LEBIH TINGGI, MELALUI DIVERSIFIKASI, PENINGKATAN DAN INOVASI TEKNOLOGI, TERMASUK MELALUI FOKUS PADA SEKTOR YANG MEMBERI NILAI TAMBAH TINGGI DAN PADAT KARYA

INDIKATOR 8.2.1

LAJU PERTUMBUHAN PDRB PER TENAGA KERJA/TINGKAT PERTUMBUHAN PDRB RIIL PER ORANG BEKERJA PER TAHUN



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 8.5

Laaju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja / Tingkat Pertumbuhan PDRB Riil per Orang Bekerja per Tahun (persen), 2018-2022

Indikator ini digunakan untuk melihat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Selama tahun 2018-2022 produktivitas tenaga kerja di Sumatera Selatan menunjukkan adanya fluktuatif. Kecenderungan mengalami kontraksi dalam di tahun 2020. Hal ini dikarenakan dampak pandemi COVID-19 sehingga pertumbuhan produktivitas menurun hingga minus 2,03 persen.

Pada tahun 2019 tercatat laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja sebesar 5,51 persen. Kemudian, di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar –2,03 persen. Pemulihan pasca COVID-19 mampu menumbuhkan PDRB per tenaga kerja di tahun 2021 menjadi 1,39 persen, dan terus meningkat di tahun 2022 menjadi 2,53 persen.



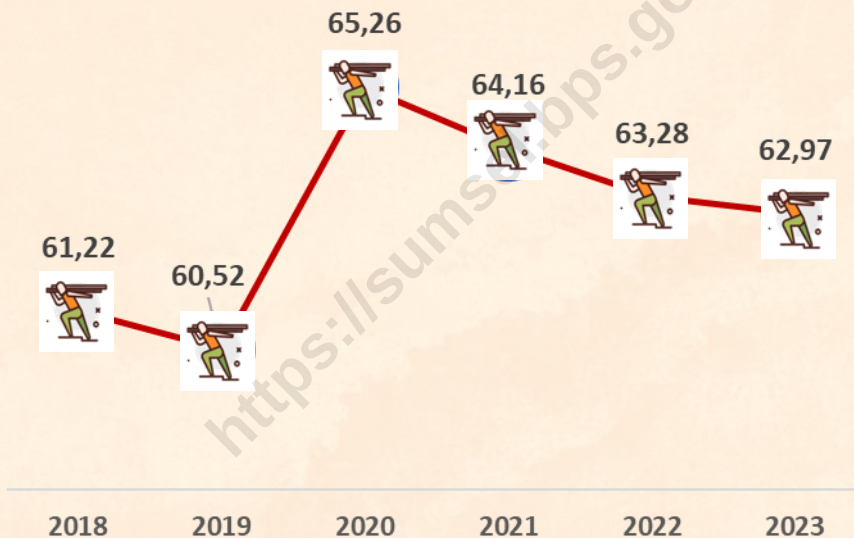
TUJUAN 8

TARGET 8.3

MENGALAKKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRODUKTIF, PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA YANG LAYAK, KEWIRAUSAHAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI, DAN MENDORONG FORMALISASI DAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TERMASUK MELALUI AKSES TERHADAP JASA KEUANGAN

INDIKATOR 8.3.1

PROPORSI LAPANGAN KERJA INFORMAL BERDASARKAN SEKTOR DAN JENIS KELAMIN



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Gambar 8.6
Proporsi Lapangan Kerja Informal, 2018-2023

Proporsi lapangan kerja informal menunjukkan penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Penduduk yang bekerja pada lapangan kerja informal rentan tidak memperoleh jaminan sosial sehingga pemerintah perlu memastikan seluruh penduduk bekerja memperoleh perlindungan sosial tanpa terkecuali. Selama enam tahun terakhir, terlihat proporsi lapangan kerja informal meningkat pada tahun 2018-2023 berturut-turut 61,22; 60,52; 65,26; 64,16; 63,28; serta 62,97 persen.

TUJUAN 8



TARGET 8.5

PADA TAHUN 2030, MENCAPI PEKERJAAN TETAP DAN PRODUKTIF DAN PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI, TERMASUK BAGI PEMUDA DAN PENYANDANG DIFABILITAS, DAN UPAH YANG SAMA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA

INDIKATOR 8.5.1

UPAH RATA-RATA PER JAM KERJA



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

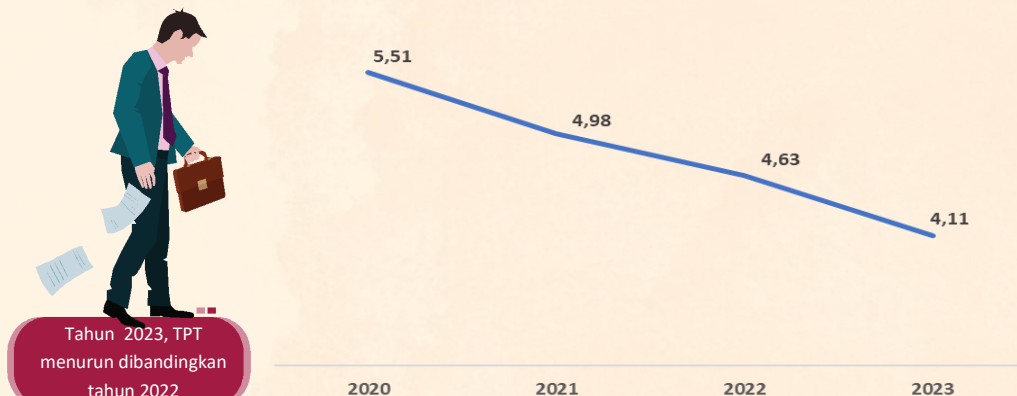
Gambar 8.7

Upah Rata-Rata per Jam Kerja (ribu rupiah), 2018-2022

Upah rata-rata per jam kerja di Sumatera Selatan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Upah rata-rata per jam kerja tahun 2022 meningkat 0,66 persen dari tahun sebelumnya.

INDIKATOR 8.5.2*

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERDASARKAN JENIS KELAMIN



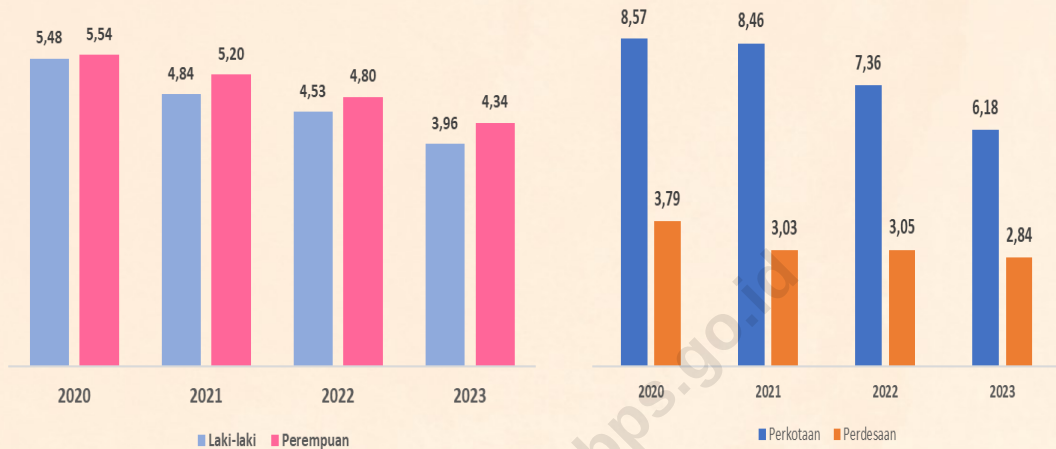
Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Gambar 8.8

Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2018-2023



TUJUAN 8



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Gambar 8.9

Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal (persen), 2020-2023

Selama periode 2020-2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Selatan mengalami penurunan seperti skala nasional. Pada tahun 2022, TPT di Sumatera Selatan menurun menjadi 4,63 persen. TPT terus mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 4,11 persen.

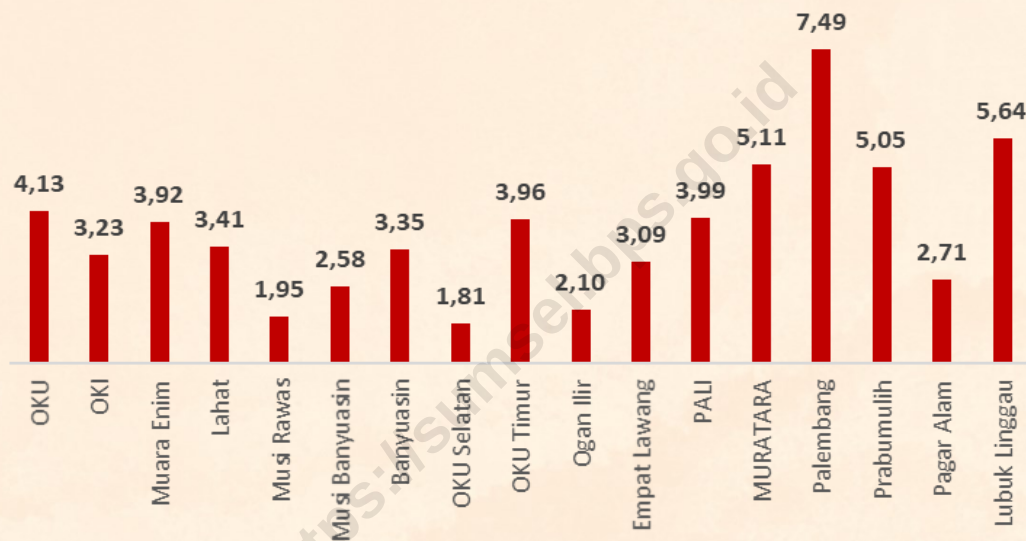
Secara absolut, angka pengangguran di Sumatera Selatan pada tahun 2023 masih relatif tinggi yaitu sebesar 19,75 ribu orang. Hal ini menunjukkan masih banyaknya pencari kerja yang tidak tertampung oleh lapangan kerja yang ada, sehingga menyebabkan mereka terpaksa menganggur. Untuk itu, diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup banyak agar dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut. Hal lain yang turut mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran di Sumatera Selatan adalah perkembangan keadaan perekonomian secara global.

TPT di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan selain karena pengaruh pertumbuhan alamiah penduduk, kemungkinan juga karena dipengaruhi oleh arus masuk angkatan kerja dari daerah perdesaan atau dari daerah lainnya di luar Provinsi Sumatera Selatan.

TUJUAN 8



Kabupaten/kota yang masih didominasi daerah perdesaan mempunyai tingkat pengangguran terbuka yang rendah, seperti Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Musi Rawas yang cenderung berkarakteristik perdesaan masing-masing TPT tahun 2023 sebesar 1,81 persen dan 1,95 persen. Sedangkan Kota Palembang mempunyai tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu 7,49 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Gambar 8.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2023

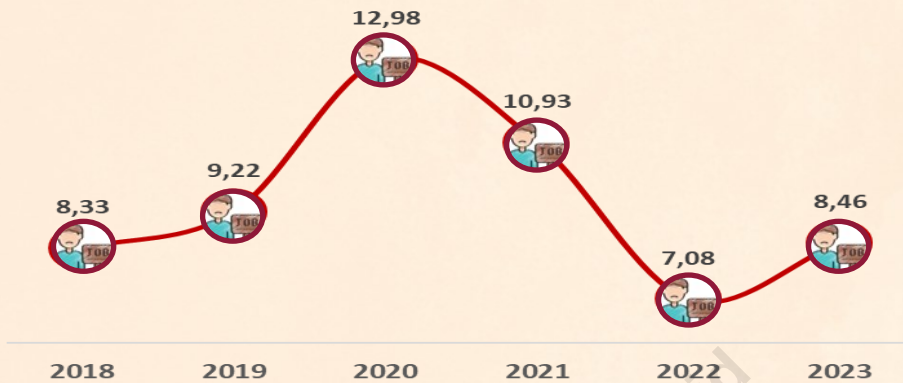
INDIKATOR 8.5.2(A) TINGKAT SETENGAH PENGANGGURAN

Di Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2023 tingkat setengah pengangguran angkanya sebesar 8,46 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 7,08 persen. Mereka yang dikategorikan sebagai setengah pengangguran dalam konsep ini adalah yaitu mereka yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari 35 jam selama seminggu dan masih mencari pekerjaan.

Pada tahun 2023, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 8,97 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 7,64 persen. Bila dibandingkan tahun 2022, baik setengah pengangguran laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan.



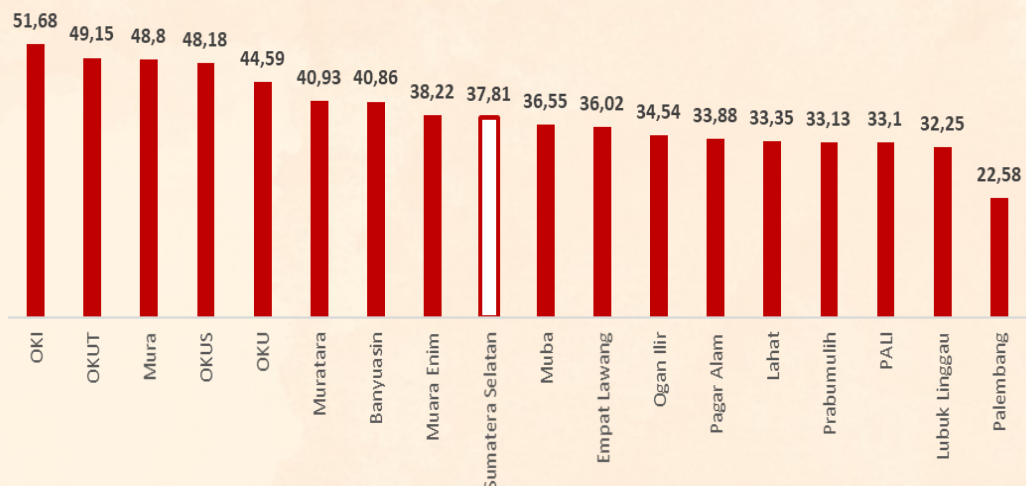
TUJUAN 8



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Gambar 8.11
Tingkat Setengah Pengangguran (persen), 2018-2023

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, hampir diseluruh kabupaten/kota di seluruh Sumatera Selatan mempunyai tingkat setengah pengangguran yang cenderung tinggi. Tingkat setengah pengangguran pada konteks ini adalah mereka yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari 35 jam selama seminggu. Bila diamati lebih lanjut, kabupaten-kabupaten dengan dominasi daerah perdesaan seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten OKU Timur memiliki tingkat setengah pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Dari sini dapat di duga bahwa penduduk yang bekerja pada kabupaten tersebut sebagian besar dari mereka adalah para pekerja keluarga di sektor pertanian.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Gambar 8.12
Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2022

TUJUAN 8

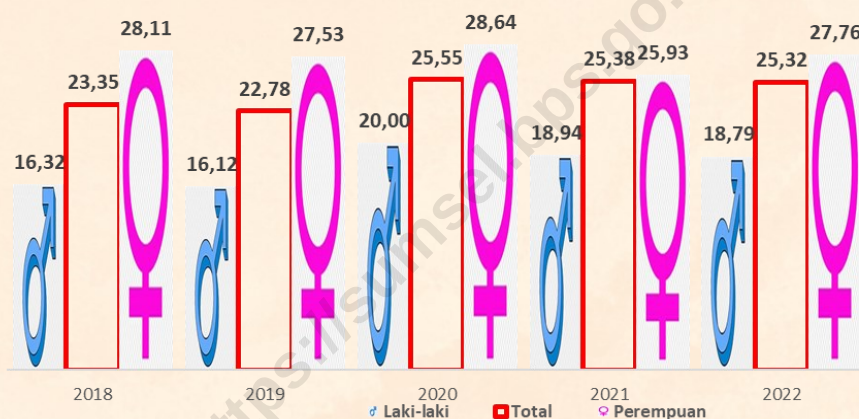


TARGET 8.6

PADA TAHUN 2020, SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI PROPORSI USIA MUDA YANG TIDAK BEKERJA, TIDAK MENEMPUH PENDIDIKAN ATAU PELATIHAN

INDIKATOR 8.6.1

PERSENTASE USIA MUDA (15-24 TAHUN) YANG SEDANG TIDAK SEKOLAH, BEKERJA, ATAU MENGIKUTI PELATIHAN (NEET)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Gambar 8.13

Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (persen), 2018-2022



Tahun 2022, pemuda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan sedikit menurun.

Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja dan mengikuti pelatihan cenderung menurun. Ada sebesar 25,32 pemuda yang tidak mengalami bekerja, sekolah, atau pelatihan pada tahun 2022, menurun sedikit dari tahun 2021 yang sebesar 25,38 persen.



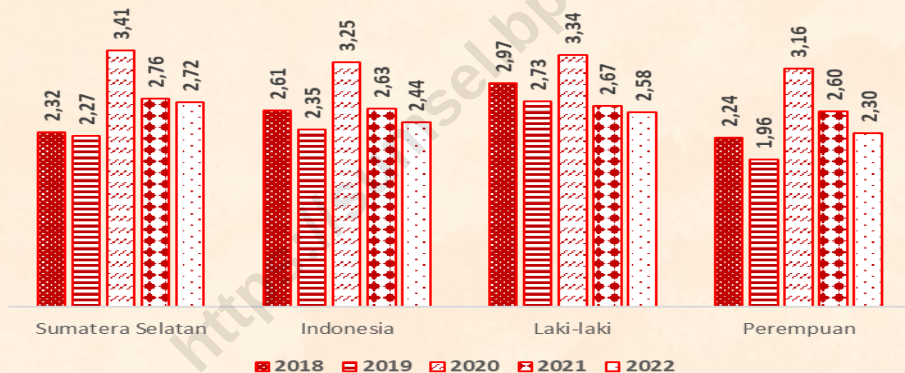
TUJUAN 8

TARGET 8.7

MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT DAN UNTUK MEMBERANTAS KERJA PAKSA, MENGAKHIRI PERBUDAKAN DAN PENJUALAN MANUSIA, MENGAMANKAN LARANGAN DAN PENGHAPUSAN BENTUK TERBURUK TENAGA KERJA ANAK, TERMASUK PEREKRUTAN DAN PENGGUNAAN TENTARA ANAK-ANAK, DAN PADA TAHUN 2025 MENGAKHIRI TENAGA KERJA DALAM SEGALA BENTUKNYA

INDIKATOR 8.7.1(A)

PERSENTASE DAN JUMLAH ANAK USIA 10-17 TAHUN, YANG BEKERJA, DIBEDAKAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Gambar 8.14

Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja, Berdasarkan Jenis Kelamin 2018-2022

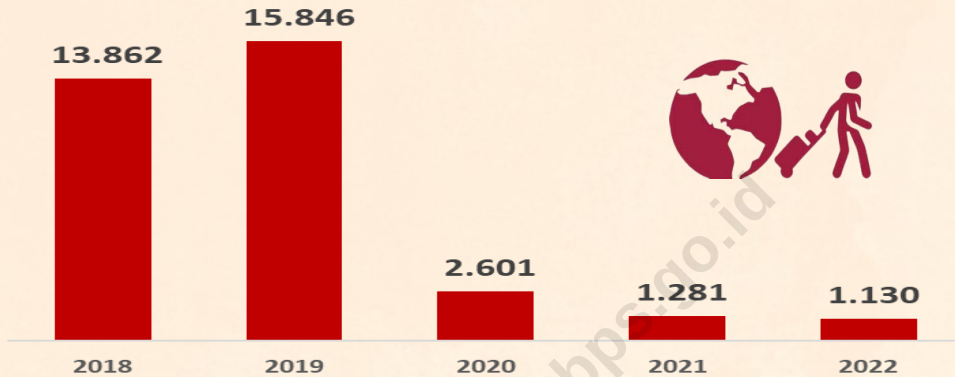
TARGET 8.9

MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT DAN UNTUK MEMBERANTAS KERJA PAKSA, MENGAKHIRI PERBUDAKAN DAN PENJUALAN MANUSIA, MENGAMANKAN LARANGAN DAN PENGHAPUSAN BENTUK TERBURUK TENAGA KERJA ANAK, TERMASUK PEREKRUTAN DAN PENGGUNAAN TENTARA ANAK-ANAK, DAN PADA TAHUN 2025 MENGAKHIRI TENAGA KERJA DALAM SEGALA BENTUKNYA

Kontribusi sektor pariwisata di Indonesia terhadap PDB pada tahun 2021 terealisasi sebesar 2,30 persen meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 2,23 persen. (Sumber data: Tourism Satellite Account, BPS).



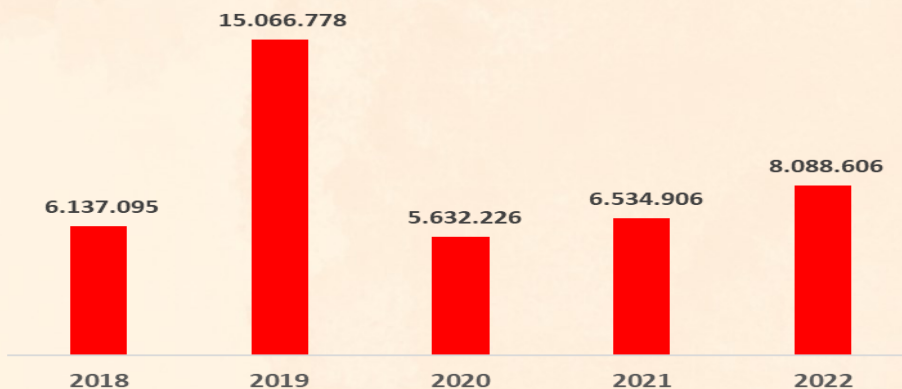
INDIKATOR 8.9.1. (A) PROPORSI DAN LAJU PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PARIWISATA



Sumber : Direktorat Jenderal Imigrasi dan MPD

Gambar 8.15
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang), 2018-2022

Pada tahun 2018, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) di Sumatera Selatan tercatat sebesar 13.862 orang, kemudian tahun 2019 mencapai titik tertinggi sebesar 15.846 orang, selanjutnya di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat besar menjadi 2.601 orang. Kemudian di tahun 2021, jumlah wisman kembali mengalami penurunan menjadi 1.282 orang. Tercatat, penurunan kunjungan wisatawan mancanegara terus berlangsung di tahun 2022 menjadi 1.130 orang.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas KOR dan Survei Wisatawan Nusantara

Gambar 8.16
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang), 2018-2022

TUJUAN 9

**Membangun Infrastruktur yang Tangguh,
Meningkatkan Industri Inklusif dan
Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi**



TUJUAN 9

Infrastruktur, Industri dan Inovasi

Aspek penting pembangunan berkelanjutan pada tujuan 9 adalah infrastruktur, industrialisasi, dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru.

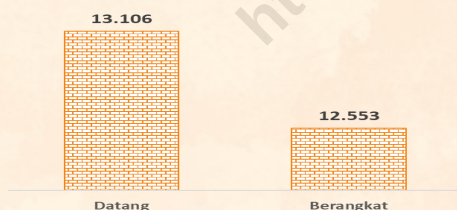
TARGET 9.1

MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN TANGGUH, TERMASUK INFRASTRUKTUR REGIONAL DAN LINTAS BATAS, UNTUK Mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

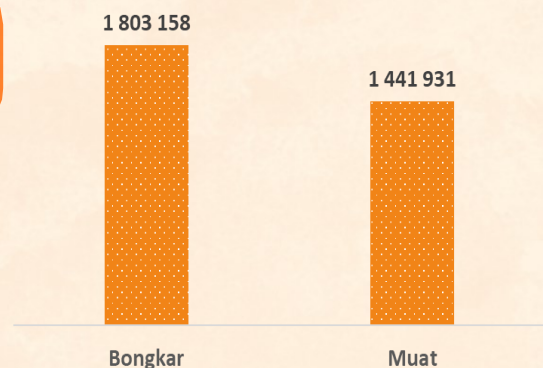
INDIKATOR 9.1.2*

JUMLAH PENUMPANG DAN BARANG BERDASARKAN MODA TRANSPORTASI

Banyak penumpang yang datang dengan moda transportasi kapal Pelayaran Domestik dibandingkan penumpang yang datang dengan moda transportasi kapal Pelayaran Domestik.

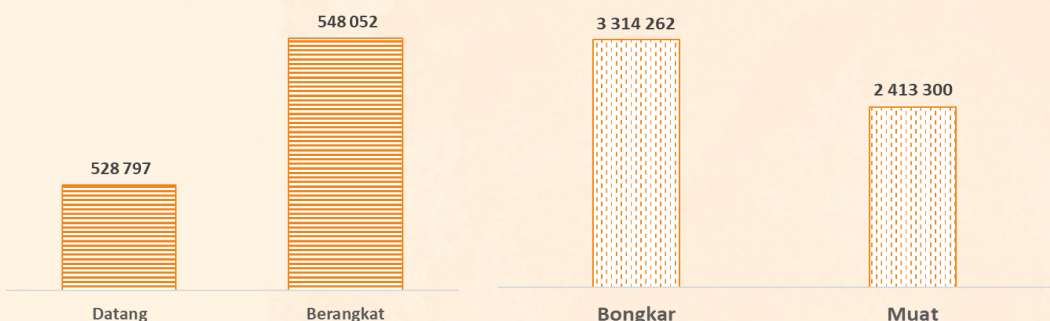


Sumber : Badan Pusat Statistik



Gambar 9.1

Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi Kapal Pelayaran Domestik, 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 9.2

Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang 2021

TUJUAN 9

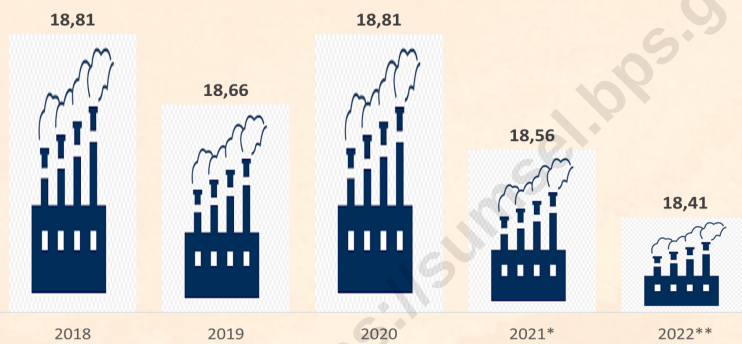


TARGET 9.2

MEMPROMOSIKAN INDUSTRIALISASI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, DAN PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN PROPORSI INDUSTRI DALAM LAPANGAN KERJA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO, SEJALAN DENGAN KONDISI NASIONAL, DAN MENINGKATKAN DUA KALI LIPAT PROPORSINYA DI NEGARA KURANG BERKEMBANG.

INDIKATOR 9.2.1

PROPORSI NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR TERHADAP PDRB DAN PER KAPITA



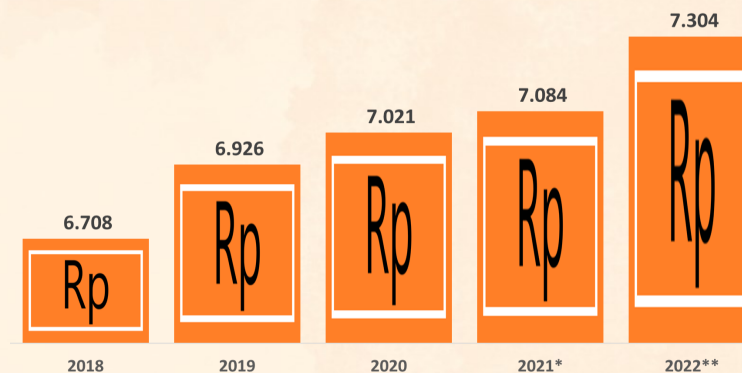
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB menunjukkan tren yang menurun Pasca Pemulihan COVID-19

Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 9.3

Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDRB dan Per Kapita, 2018-2022



Nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

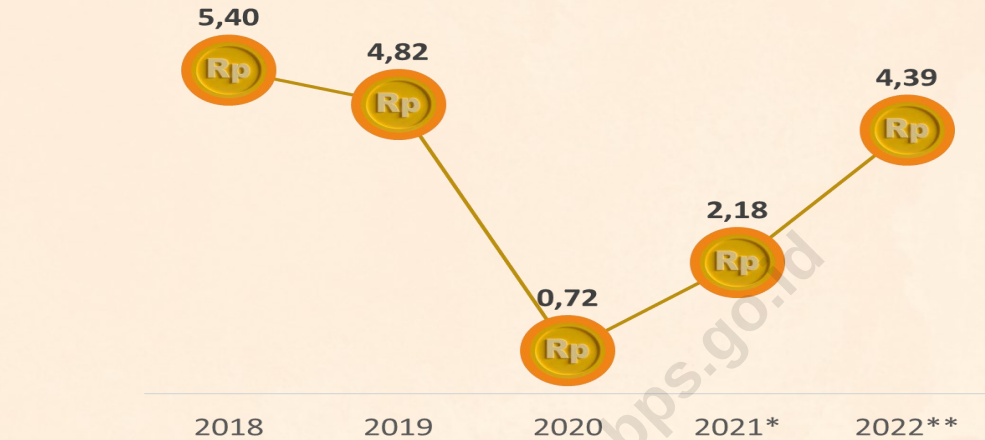
Gambar 9.4

Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Per Kapita (Ribu Rupiah), 2018-2022



TUJUAN 9

INDIKATOR 9.2.1. (A) LAJU PERTUMBUHAN PDRB INDUSTRI MANUFAKTUR

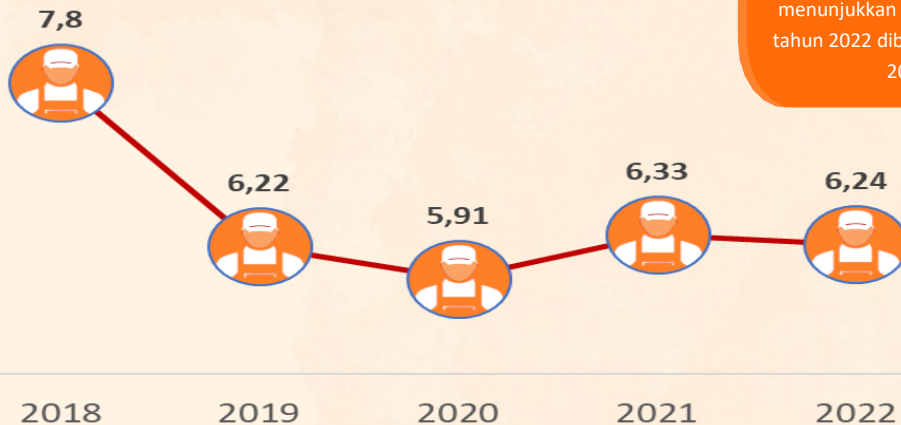


Catatan : * : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 9.5
Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur Sumatera Selatan (persen), 2018-2022

INDIKATOR 9.2.2* PROPORSI TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR



Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur menunjukkan penurunan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 9.6
Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur Sumatera Selatan (persen), 2018-2022

TUJUAN 9

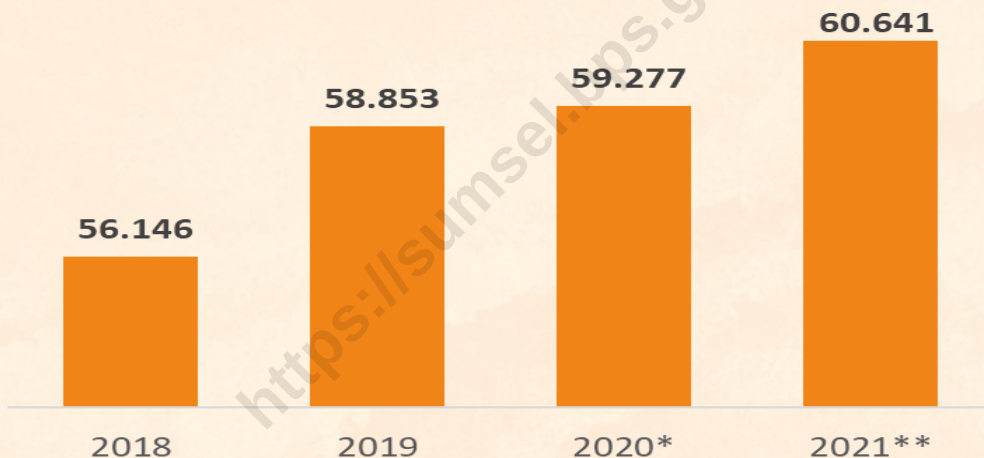


TARGET 9.4

PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN RETROFIT INDUSTRI AGAR DAPAT BERKELANJUTAN, DENGAN PENINGKATAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA DAN ADOPSI YANG LEBIH BAIK DARI TEKNOLOGI DAN PROSES INDUSTRI BERSIH DAN RAMAH LINGKUNGAN, YANG DILAKSANAKAN SEMUA NEGARA SESUAI KEMAMPUAN Masing-masing.

INDIKATOR 9.4.1*

RASIO EMISI CO₂/EMISI GAS RUMAH KACA DENGAN NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR



Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 9.7

Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur (Data Pembagi) (Milyar Rupiah), 2018-2021

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri tahun 2021 sebesar 60,641 milyar rupiah. Pemerintah berupaya mendorong pelaku sektor industri agar beralih menggunakan peralatan dan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah emisi dengan pemberian insentif.



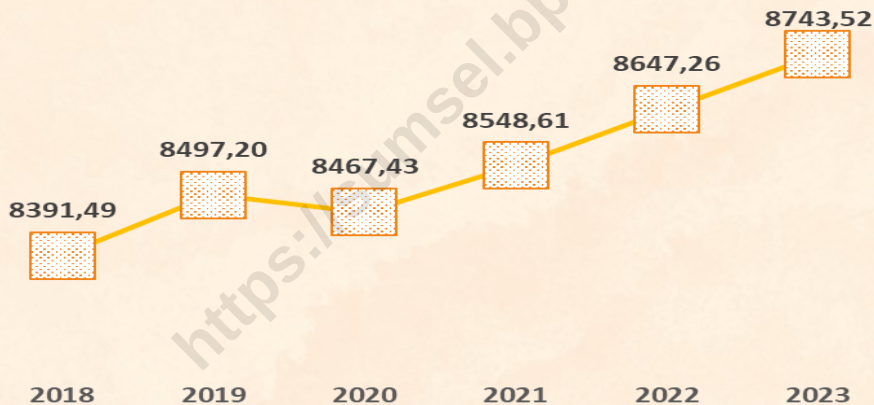
TUJUAN 9

TARGET 9.5

MEMPERKUAT RISET ILMIAH, MENINGKATKAN KAPABILITAS TEKNOLOGI SEKTOR INDUSTRI DI SEMUA NEGARA, TERUTAMA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, TERMASUK PADA TAHUN 2030, MENDORONG INOVASI SECARA SUBSTANSIAL MENINGKATKAN JUMLAH PEKERJA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PER 1 JUTA ORANG DAN MENINGKATKAN PEMBELANJAAN PUBLIK DAN SWASTA UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

INDIKATOR 9.5.2*

JUMLAH PENDUDUK HASIL PROYEKSI (RIBU JIWA)



Catatan : (1) Hasil Proyeksi SUPAS 2015-2025 untuk data tahun 2018-2019
(2) Hasil Sensus Penduduk 2020 untuk data tahun 2020
(3) Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2035 untuk data mulai tahun 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik

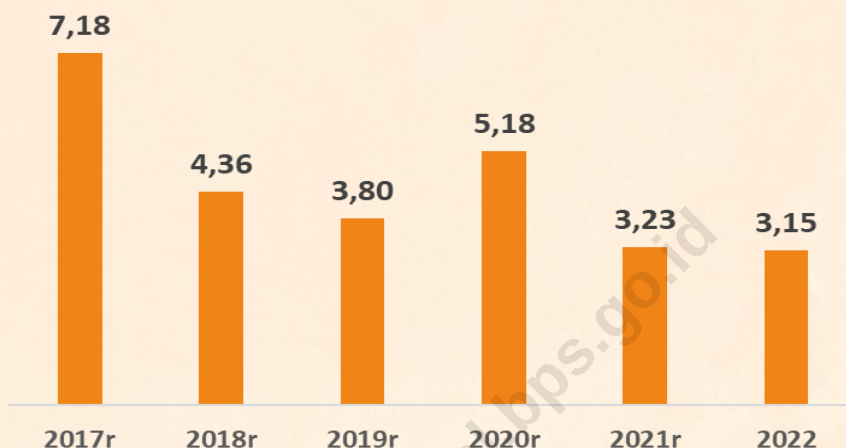
Gambar 9.8
Jumlah Penduduk Sumatera Selatan (Ribu Jiwa), 2018-2023

TUJUAN 9



INDIKATOR 9.B.1.(A)

PROPORSI EKSPOR PRODUK INDUSTRI BERTEKNOLOGI Tinggi (PEPIBT)



Catatan : r: angka tahun 2017-2021 merupakan angka revisi tahunan dan sudah dikonversi menggunakan BTKI 2022

Angka tahun 2022 merupakan angka tetap (revisi tahunannya, akan terbit di Juni 2023)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 9.9
Proporsi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi (PEPIBT)
Menurut Provinsi Asal Barang(persen), 2017-2022

Proporsi EPBIT terhadap total ekspor menunjukkan penurunan sejak 2020. Proporsi EPBIT mencerminkan proses transisi struktural di sektor industri dari industri berbasis sumberdaya dan berteknologi rendah ke aktivitas industri berteknologi tinggi.

TUJUAN 10

**Mengurangi Kesenjangan Intra
dan Antar negara**

<https://sumsel.bps.go.id>



TUJUAN 10

Mengurangi Ketimpangan

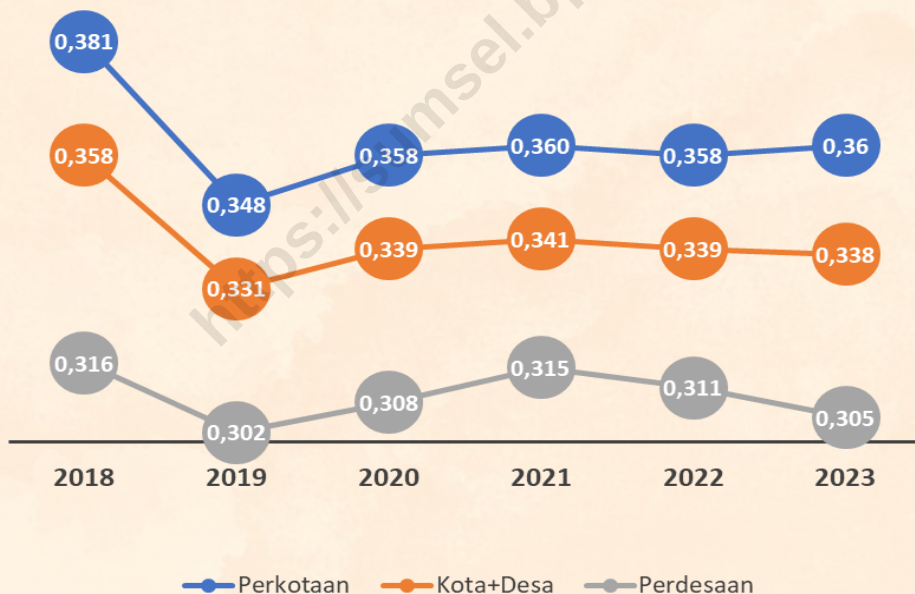
Kesenjangan dapat terjadi dalam suatu negara atau antarnegara, adanya kesenjangan dapat mengancam pembangunan dalam jangka panjang, baik dari sisi pembangunan sosial maupun ekonomi. Kesenjangan juga akan mengganggu penurunan kemiskinan dan apabila dibiarkan akan menimbulkan tindak kriminal dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian penurunan kesenjangan harus disegerakan baik di dalam negara sendiri maupun antarnegara

TARGET 10.1

BERKURANGNYA KESENJANGAN

INDIKATOR 10.1.1*

RASIO GINI



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

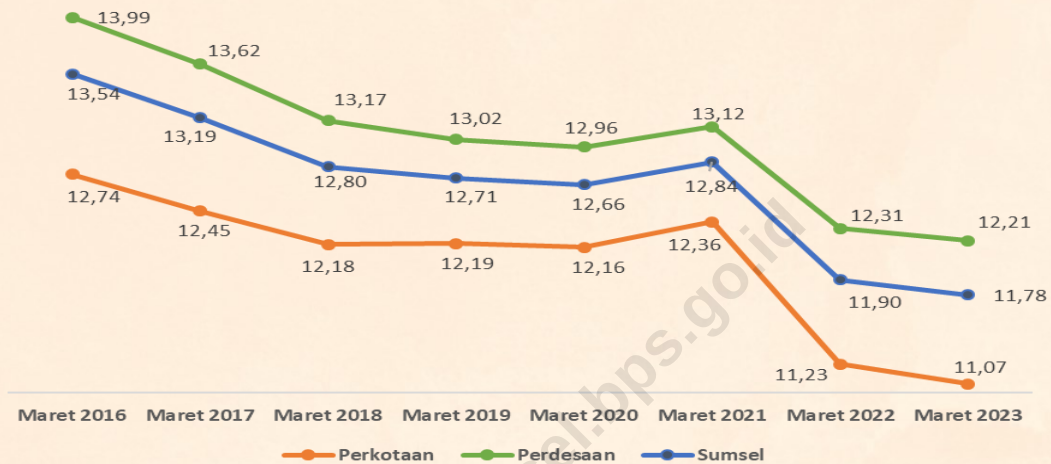
Gambar 10.1
Rasio Gini, 2018-2023

Ketimpangan di Sumatera Selatan cenderung tidak berubah dari tahun 2018 hingga tahun 2023, ditandai dengan nilai rasio gini yang cenderung konstan. Berdasarkan daerah tempat tinggal, daerah perkotaan cenderung mempunyai ketimpangan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah perdesaan.

TUJUAN 10



INDIKATOR 10.1.1.(A) PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN

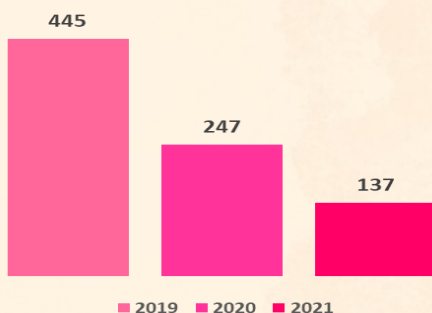


Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 10.2
Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan
Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2016-2023

Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pada Maret 2023, terdapat 12 dari 100 penduduk yang tinggal di daerah perdesaan dan 11 dari 100 penduduk yang tinggal di daerah perkotaan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, terdapat 12 dari 100 penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan provinsi Sumatera Selatan.

INDIKATOR 10.1.1.(B) JUMLAH DESA TERTINGGAL



Sumber : Badan Pusat Statistik, Indeks Desa

Selama tahun 2019 hingga 2021, jumlah desa dengan status tertinggal berkurang drastis. Kondisi ini disebabkan oleh semakin membaiknya pembangunan di desa dan merubah status desa tersebut menjadi desa berkembang atau desa maju.

Gambar 10.3
Jumlah Desa Tertinggal, 2019-2022



TUJUAN 10

INDIKATOR 10.1.1.(C) JUMLAH DESA MANDIRI

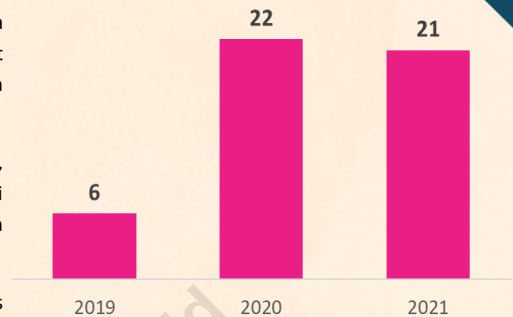
Catatan:

Mulai dari 2019, menggunakan sumber Indeks Desa. Sebelumnya menggunakan Indeks Pembangunan Desa (tahun 2018). Terdapat perbedaan kategori di antara keduanya sehingga tidak bisa dibandingkan.

Indeks Pembangunan Desa terdiri dari 3 kategori (Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Mandiri), sedangkan Indeks Desa terdiri dari 5 kategori (sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri).

Indeks Desa 2019 dihitung berdasarkan data hasil Pendataan Podes 2018 dan Updating Podes 2019 serta menggunakan daftar desa Kepmendagri No.414 Tahun 2019.

Indeks Desa 2020 dihitung berdasarkan data hasil Updating Podes 2020 dan menggunakan daftar desa Kepmendagri No.146 Tahun 2020.

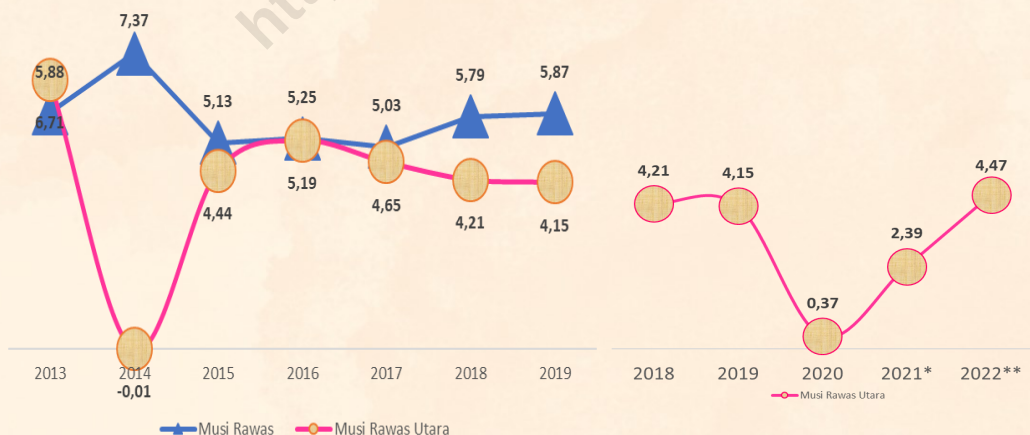


Sumber : Badan Pusat Statistik, Indeks Desa

Gambar 10.4
Jumlah Desa Mandiri, 2019-2021

Penambahan jumlah desa mandiri tidak lepas dari peran serta pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama membangun desa dengan beragam program pembangunan. Seiring dengan menurunnya jumlah desa tertinggal, jumlah desa mandiri mengalami kenaikan yang signifikan selama 2019 hingga 2020 kemudian mengalami penurunan di tahun 2021.

INDIKATOR 10.1.1.(E) RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH TERTINGGAL



Catatan: Sejak tahun 2020, daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan tinggal 1 kabupaten

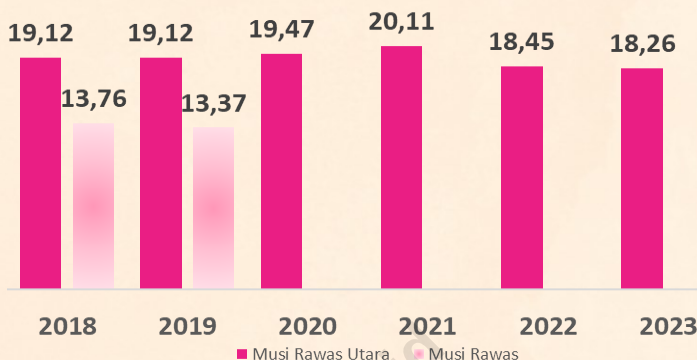
Gambar 10.5
Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal, 2018-2022

Pada tahun 2022, rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 4,47 persen setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang sangat tajam.

TUJUAN 10



Persentase penduduk miskin pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan. Tetapi, pandemi COVID-19 secara tidak langsung berdampak pada peningkatan persentase kemiskinan, tidak terkecuali bagi penduduk di daerah tertinggal



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

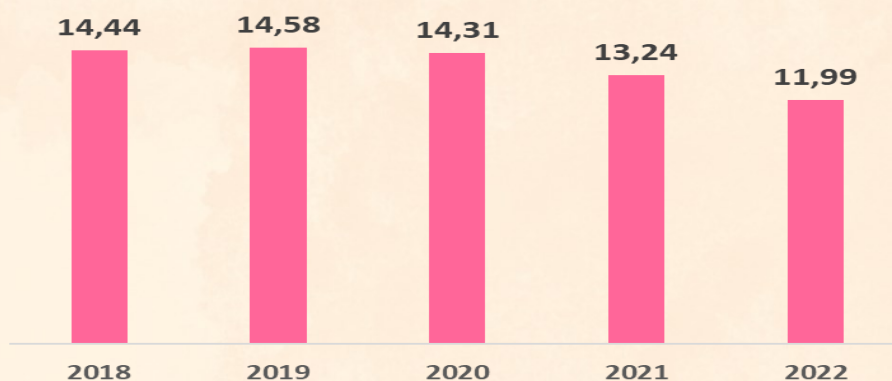
Gambar 10.6
Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal, 2018-2023

TARGET 10.2

PADA TAHUN 2030, MEMBERDAYAKAN DAN MENINGKATKAN INKLUSI SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK BAGI SEMUA, TERLEPAS DARI USIA, JENIS KELAMIN, DIFABILITAS, RAS, SUKU, ASAL, AGAMA ATAU KEMAMPUAN EKONOMI ATAU STATUS LAINNYA

INDIKATOR 10.2.1*

PROPORSI PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH 50 PERSEN DARI MEDIAN PENDAPATAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENYANDANG DISABILITAS



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 10.7
Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah 50 Persen dari Median Pendapatan Penyandang Difabilitas, 2018-2022



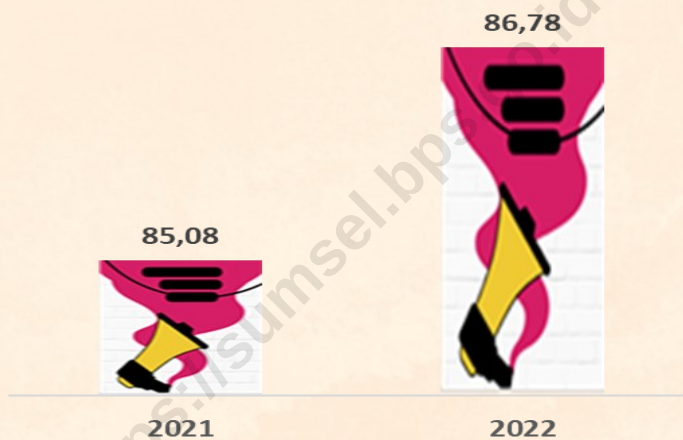
TUJUAN 10

TARGET 10.3

MENJAMIN KESEMPATAN YANG SAMA DAN MENGURANGI KESENJANGAN HASIL, TERMASUK DENGAN MENGHAPUS HUKUM, KEBIJAKAN DAN PRAKTIK YANG DISKRIMINATIF, DAN MEMPROMOSIKAN LEGISLASI DAN KEBIJAKAN TERSEBUT

INDIKATOR 10.3.1.(A)

INDEKS KEBEBASAN



Catatan: Penghitungan IDI mulai tahun 2021 menggunakan metode baru

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kemenko Polhukam

Gambar 10.8
Indeks Aspek Kebebasan Sumatera Selatan (persen), 2021-2022

TUJUAN 11

**Menjadikan Kota dan Permukiman
Inklusif, Aman, Tangguh dan
Berkelanjutan**



TUJUAN 11

Kota dan Komunitas Berkelanjutan

Proyeksi pada tahun 2030 lebih dari enam puluh persen penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan pembangunan daerah perkotaan dalam aspek perekonomian yang lebih efisien pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, transportasi dan jasa. Dengan perencanaan dan manajemen resiko yang baik, maka kota dapat dijadikan inkubator untuk inovasi, pertumbuhan, dan penggerak dari pembangunan berkelanjutan.

Indikator rumah layak huni dapat berguna untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikasi terpenuhinya kebutuhan dasar perumahan. Pada indikator ini, data yang tersedia merupakan data proporsi.

TARGET 11.1 **PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA TERHADAP PERUMAHAN YANG LAYAK, AMAN TERJANGKAU, TERMASUK PENATAAN KAWASAN KUMUH, SERTA AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR PERKOTAAN**

INDIKATOR 11.1.1(A) **PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU**

Tahun 2022 persentase rumah tangga di Sumatera Selatan yang menempati rumah layak tercatat sebesar 59,96 persen. Angka ini terus meningkat di banding tahun-tahun sebelumnya.



Catatan: Tahun 2019 ke atas menggunakan konsep sanitasi layak dan air layak terbaru berdasarkan berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019.

*Data Tahun 2018 merupakan Backcasting dengan metode baru (tahun 2019).

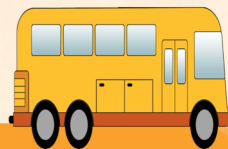
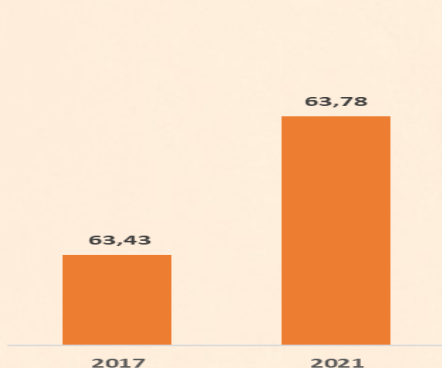
Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 11.1
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak di Sumatera Selatan, 2018-2022

TUJUAN 11



INDIKATOR 11.2.1(A) PROPORSI POPULASI YANG MENDAPATKAN AKSES YANG NYAMAN PADA TRANSPORTASI PUBLIK



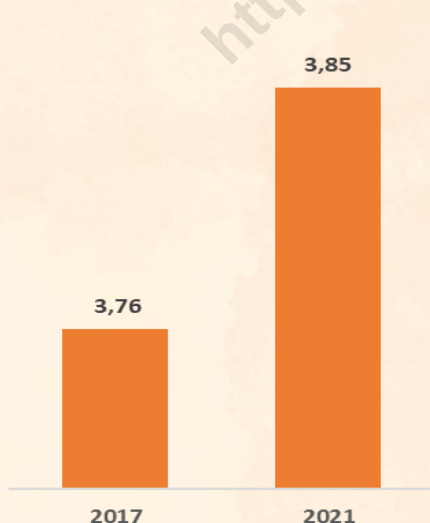
Jangkauan terhadap transportasi umum diupayakan terus meluas bagi seluruh penduduk. Pada tahun 2021 persentase rumah tangga di Sumatera Selatan yang memiliki akses nyaman (jarak 0,5 km) ke transportasi umum tercatat sebesar 63,78 persen. Angka tersebut meningkat dibanding tahun 2017 yang menunjukkan angka 63,43 persen.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Hansos

Gambar 11.2

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Nyaman (Jarak 0,5 Km) ke Transportasi Umum di Sumatera Selatan, 2017 dan 2021

INDIKATOR 11.2.1(B) PERSENTASE PENDUDUK TERLAYANI TRANSPORTASI UMUM



Pada tahun 2021, sebanyak 3,85 persen dari total penduduk berumur 10 tahun ke atas di Sumatera Selatan telah menggunakan kendaraan umum dengan rute tertentu. Angka tersebut naik dibanding tahun 2017. Akses terhadap transportasi umum menjadi salah satu kebutuhan pada pembangunan perkotaan yang inklusif.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Hansos

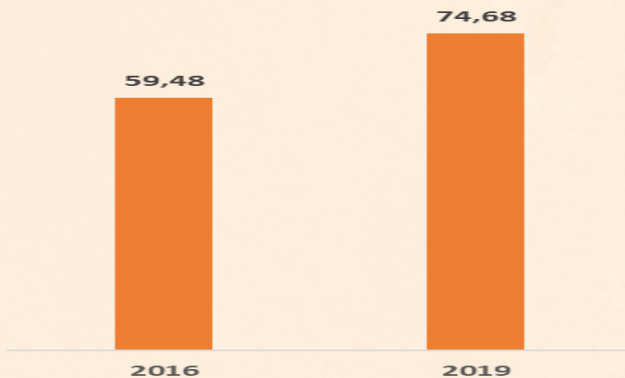
Gambar 11.3

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan Rute Tertentu di Sumatera Selatan, 2017 dan 2021



TUJUAN 11

INDIKATOR 11.6.1.(A) PERSENTASE RUMAH TANGGA DI PERKOTAAN YANG TERLAYANI PENGELOLAAN SAMPAHNYA



Sumber : Badan Pusat Statistik



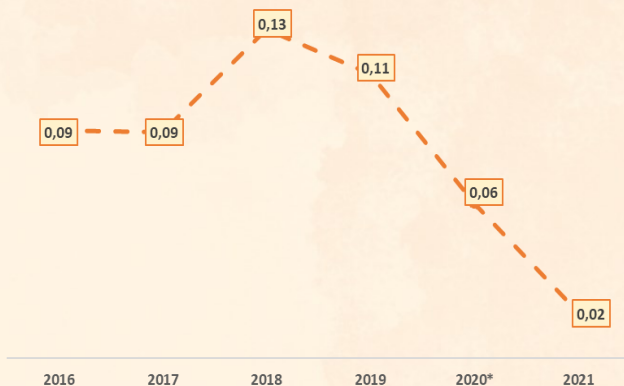
Pada tahun 2019, sebanyak 74,68 persen dari total rumah tangga di perkotaan Sumatera Selatan yang melakukan pengelolaan sampah. Angka tersebut naik dibanding tahun 2016.

Gambar 11.4

Persentase Rumah Tangga di Perkotaan yang Melakukan Pengelolaan Sampah di Sumatera Selatan, 2016 dan 2019

Rumah tangga dikatakan melakukan pengelolaan sampah apabila rumah tangga paling tidak melakukan salah satu dari pengelolaan sampah berupa diangkut oleh petugas, dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), didaur ulang, dibuat kompos, ataupun disetor ke bank sampah.

INDIKATOR 11.7.2.(A) PROPORSI PENDUDUK YANG MENGALAMI KEJAHATAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR



Penduduk Sumatera Selatan yang mengalami kejahatan kekerasan selama tahun 2021 sebesar 0,02 persen. Angka tersebut terus turun dari tiga tahun terakhir. Salah satu syarat untuk menjadikan kota yang aman dan inklusif adalah keamanan untuk semua, baik perempuan, anak-anak, lansia, maupun penyandang disabilitas.

Catatan: Time reference indikator adalah 1 Januari - 31 Desember t-1 (Data Januari—Desember 2020 diperoleh melalui Susenas Tahun 2021).

Kejahatan Kekerasan: penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan pelecehan seksual

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 11.5

Persentase Penduduk yang Mengalami Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir di Sumatera Selatan, 2016-2021

TUJUAN 16

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan



TUJUAN 16

Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan ke-16 dari TPB ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan adil, dengan fokus pada pencegahan konflik, penanganan kekerasan, pemberantasan ketidakadilan, dan pembangunan lembaga-lembaga yang kuat untuk menopang kedamaian dan keadilan. TPB ke-16 juga memberikan perhatian khusus pada upaya pencegahan konflik dan membangun kedamaian yang berkelanjutan yang melibatkan langkah-langkah untuk menangani akar penyebab konflik, mempromosikan dialog antar-kelompok, dan membangun toleransi di antara masyarakat yang beragam. Dengan menciptakan fondasi yang kuat dalam perdamaian, keadilan, dan lembaga-lembaga yang efektif, dunia dapat bersama-sama merangkul masa depan yang lebih baik untuk semua.

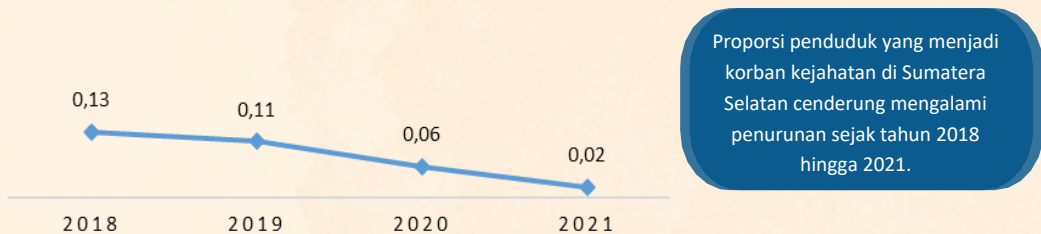
Pembangunan berkelanjutan harus mampu mengatasi berbagai ancaman kejahatan seperti ancaman pembunuhan, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, dan perdagangan manusia. Selain mengakhiri kekerasan, promosi supremasi hukum dan penguatan institusi di setiap tingkatan dapat menjadi langkah dalam mencapai tujuan ini. Perlindungan terhadap korban kekerasan, tindak kejahatan dan eksploitasi juga perlu terus ditingkatkan untuk mencapai perdamaian, stabilitas dan pemenuhan hak asasi manusia.

TARGET 16.1

SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI SEGALA BENTUK KEKERASAN DAN TERKAIT ANGKA KEMATIAN DIMANAPUN

INDIKATOR 16.1.3.(A)

PROPORSI PENDUDUK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional

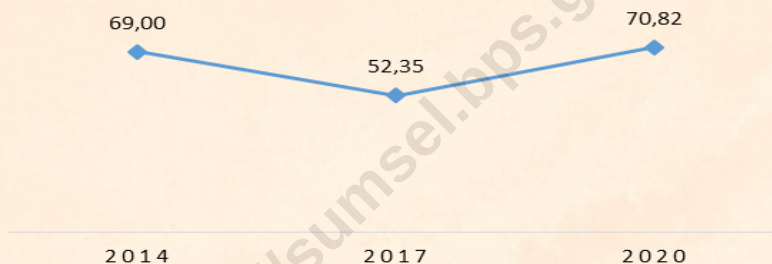
Gambar 16.1
Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan dalam 12 Bulan Terakhir, 2018-2021

TUJUAN 16



Kejahatan kekerasan dalam konteks ini mencakup penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan pelecehan seksual. Dalam empat tahun terakhir, penduduk yang mengalami kekerasan di Sumatera Selatan mengalami penurunan, mmenandakan upaya pencegahan dan pengamanan lingkungan di Sumatera Selatan, terutama di wilayah rawan kekerasan semakin baik. Kinerja aparat keamanan dan partisipasi aktif masyarakat memberikan dampak yang positif. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya juga meningkat.

INDIKATOR 16.1.4 PROPORSI PENDUDUK YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI AREA TEMPAT TINGGALNYA



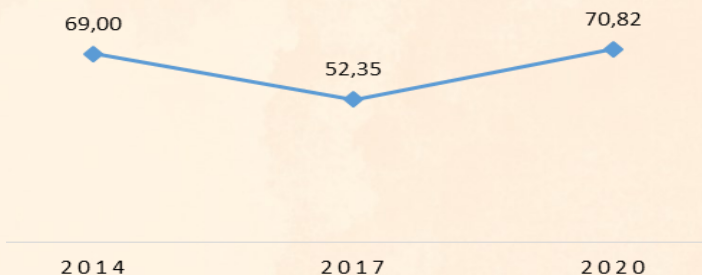
Keterangan : Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Hansos dilaksanakan setiap 3 tahun

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Hansos

Gambar 16.2

Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggal, 2014-2020

INDIKATOR 16.2.1.(A) PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ANAK UMUR 1-17 TAHUN YANG MENGALAMI HUKUMAN FISIK DAN/ATAU AGRESI PSIKOLOGIS DARI PENGASUH DALAM SETAHUN TERAKHIR



Keterangan : Pertanyaan terkait indikator ini muncul pada Susenas Modul Hansos 2014 dan 2020, Susenas 2014 Anak Usia 1-14 Tahun, Susenas 2020 Anak Usia 1-17 Tahun

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Hansos

Gambar 16.3

Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir, 2014-2020

Hukuman fisik dan/atau agresi psikologis yang diterima anak dapat membekas dan mempengaruhi mentalnya saat tumbuh dewasa. Dibandingkan tahun 2014, proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis mengalami penurunan.



TUJUAN 16

INDIKATOR 16.3.1.(A) PROPORSI KORBAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR YANG MELAPORKAN KEPADA POLISI.



Keterangan : Terdapat nilai RSE > 25 untuk disagregasi berdasarkan provinsi (tahun 2021)
Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Selama kurun waktu tahun 2017-2021 rata-rata hanya sekitar setengah dari korban kekerasan di Sumatera Selatan yang melaporkannya ke polisi. Hal ini dipengaruhi banyak hal dan Polri perlu berinovasi untuk meningkatkan capaian indikator ini sehingga meningkatkan rasa aman di masyarakat.

Gambar 16.4

Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan Kepada Polisi, 2017-2022

TARGET 16.7

MENJAMIN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG RESPONSIF, INKLUSIF, PARTISIPATIF DAN REPRESENTATIF DI SETIAP TINGKATAN

INDIKATOR 16.7.2.(A) INDEKS KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI DALAM 12 BULAN TERAKHIR



Keterangan : Penghitungan IDI mulai tahun 2021 menggunakan metode baru
Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kemenko Polhukam

Gambar 16.5

Indeks Kapasitas Kelembagaan Demokrasi, 2021-2022

Indeks Kapasitas Kelembagaan Demokrasi mengukur sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan kesetaraan. Kinerja lembaga demokrasi termasuk kinerja Lembaga legislatif dan yudikatif, netralitas penyelenggaraan pemilu, putusan PTUN terkait kebijakan pejabat pemerintah, kinerja birokrasi pelayanan publik dan sebagainya. Pada tahun 2022, indeks kapasitas lembaga demokrasi di Sumatera Selatan mencapai 74,15 poin. Indeks ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan semakin baiknya pelaksanaan demokrasi di wilayah ini.

TUJUAN 16



INDIKATOR 16.7.2.(B) INDEKS ASPEK KEBEBASAN

Kebebasan individu dalam berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat sebagai warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diukur dengan Indeks Aspek Kebebasan. Perbaikan terjadi pada aspek kebebasan di Sumatera Selatan, indeks mengalami peningkatan dari 85,08 di tahun 2021 menjadi 86,78 di tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kebebasan individu dan kelompok dalam berkumpul, berserikat, berpendapat, berkeyakinan, dan kebebasan dari adanya diskriminasi.



Keterangan : Penghitungan IDI mulai tahun 2021 menggunakan metode baru

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kemenko Polhukam

Gambar 16.6
Indeks Aspek Kebebasan, 2021-2022

INDIKATOR 16.7.2.(C) INDEKS KESETARAAN



Keterangan : Penghitungan IDI mulai tahun 2021 menggunakan metode baru

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kemenko Polhukam

Gambar 16.7
Indeks Kesetaraan, 2021-2022

Capaian Indeks Kesetaraan di Sumatera Selatan sepanjang tahun 2021-2022 juga menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender, kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah, kesetaraan dalam pelayanan dasar, akses masyarakat terhadap informasi publik, serta partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.



TUJUAN 16

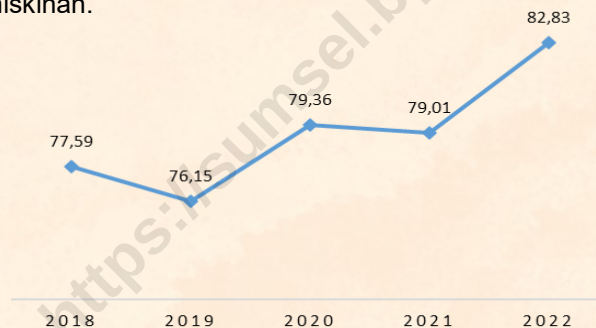
TARGET 16.9

PADA TAHUN 2030, MEMBERIKAN IDENTITAS YANG SYAH BAGI SEMUA, TERMASUK PENCATATAN KELAHIRAN

INDIKATOR 16.9.1*

Proporsi Anak Berumur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil

Akta kelahiran adalah dokumen resmi negara yang merupakan surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Persentase anak berumur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 82,83 persen anak di bawah 5 tahun di Sumatera Selatan telah memiliki akta kelahiran. Rendahnya kepemilikan akta kelahiran dikhawatirkan berdampak pada rendahnya jaminan pengakuan anak di hadapan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hak-haknya seperti mendapatkan pelayanan kesehatan dan kemiskinan.



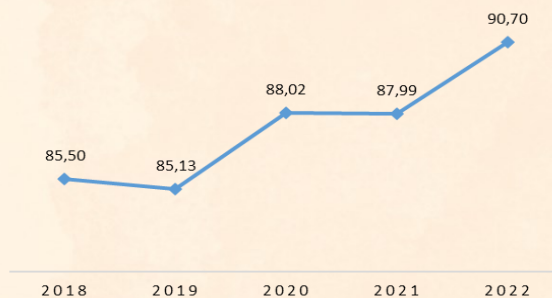
Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Gambar 16.8

Persentase Anak Berumur di Bawah 5 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, 2018-2022

INDIKATOR 16.9.1.(A)

PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA LAHIR UNTUK PENDUDUK 40% BERPENDAPATAN RENDAH



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional

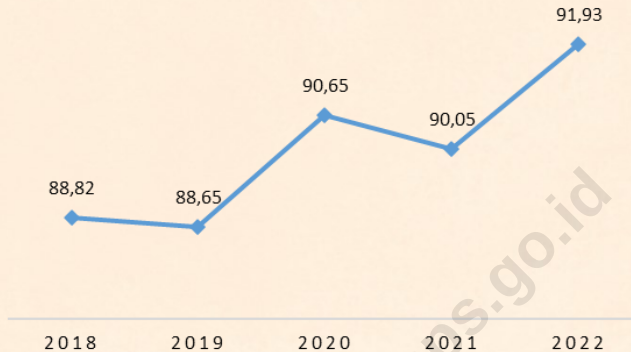
Gambar 16.9

Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun dengan Pendapatan 40% Bawah yang Memiliki Akta Kelahiran, 2018-2022

TUJUAN 16



INDIKATOR 16.9.1.(B) PERSENTASE ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Gambar 16.10
Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, 2018-2022

Secara umum, persentase anak di Sumatera Selatan yang memiliki akte kelahiran di tahun 2022 mencapai 91,93 persen. Angka tersebut cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa jaminan pengakuan anak di mata hukum semakin meningkat dari tahun ke tahun.

TUJUAN 17

**Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan
Merevitalisasi Kemitraan Global untuk
Pembangunan Berkelanjutan**



TUJUAN 17

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

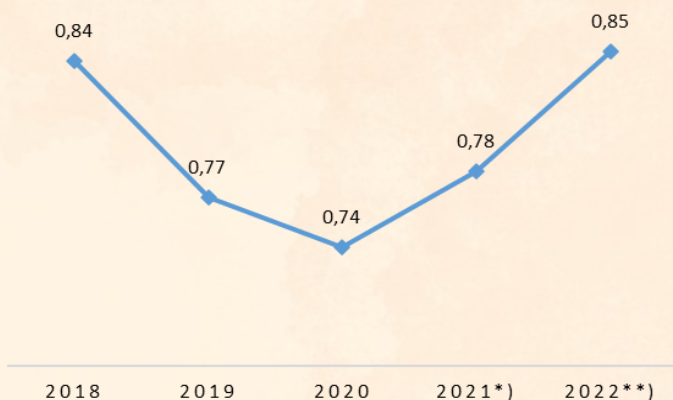
Agenda pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan terjalannya kemitraan dan kerja sama global yang kuat. Kemitraan yang inklusif dijalin antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta dibangun atas prinsip, visi, dan tujuan bersama. Kerja sama di tingkat internasional juga harus ditingkatkan guna memastikan dan memberikan kesempatan kepada negara-negara berkembang. Kebijakan-kebijakan internasional harus dapat mendukung negara berkembang dalam mempromosikan perdagangan internasional, investasi, dan meningkatkan ekspor. Dengan demikian, sistem perdagangan yang berdasarkan peraturan yang adil universal, terbuka dan menguntungkan bagi semua dapat tercapai.

TARGET 17.1

MENGOPERASIONALISASIKAN SECARA PENUH BANK TEKNOLOGI DAN SAINS, MEKANISME PEMBANGUNAN KAPASITAS TEKNOLOGI DAN INOVASI UNTUK NEGARA KURANG BERKEMBANG PADA TAHUN 2017 DAN MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG MEMAMPUKAN, KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

INDIKATOR 17.1.1

TOTAL PENDAPATAN PEMERINTAH SEBAGAI PROPORSI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) MENURUT SUMBERNYA



Keterangan : 2015-2020 Berdasarkan angka Realisasi APBD dan angka PDRB

Catatan : *) Berdasarkan angka realisasi APBD dan angka sementara PDRB ADHB

**) Berdasarkan angka APBD dan angka sangat sementara PDRB ADHB

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pendapatan asli daerah (PAD) dapat mengindikasikan kekuatan dan kemandirian suatu wilayah untuk mewujudkan cita-cita pembangunannya. Proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap PDRB Sumatera Selatan yang sempat merosot di tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 kembali menguat hingga mencapai 0,85 persen

Gambar 17.1

Proporsi Total Pendapatan Pemerintah (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap PDRB Sumatera Selatan (persen), 2018-2022

TUJUAN 17



INDIKATOR 17.1.1.(A) RASIO PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PDB

Sumatera Selatan perlu strategi dan upaya kerja untuk menggenjot kembali penerimaan pajak daerah. Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB Sumatera Selatan cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



2018 2019 2020 2021*) 2022**)

Keterangan : 2015-2020 Berdasarkan angka Realisasi APBD dan angka PDRB

Catatan : *) Berdasarkan angka realisasi APBD dan angka sementara PDRB ADHB

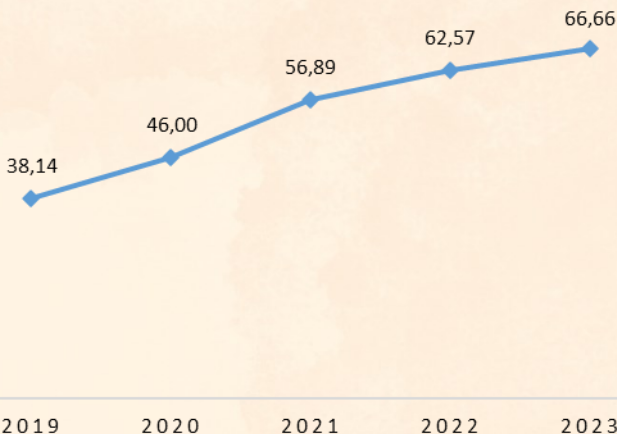
**) Berdasarkan angka APBD dan angka sangat sementara PDRB ADHB

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 17.2

Rasio Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PDRB Sumatera Selatan (persen), 2018-2022

INDIKATOR 17.8.1 PROPORSI INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN INTERNET



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 17.3

Proporsi Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet, 2019-2023

Selama tahun 2019-2023, persentase penduduk Sumatera Selatan yang menggunakan internet terus mengalami peningkatan hingga mencapai 66,66 persen di tahun 2023.

Peningkatan tersebut menunjukkan peran internet sebagai media informasi dan komunikasi seiring dengan adanya pembangunan teknologi informasi dan perkembangan masyarakat digital.

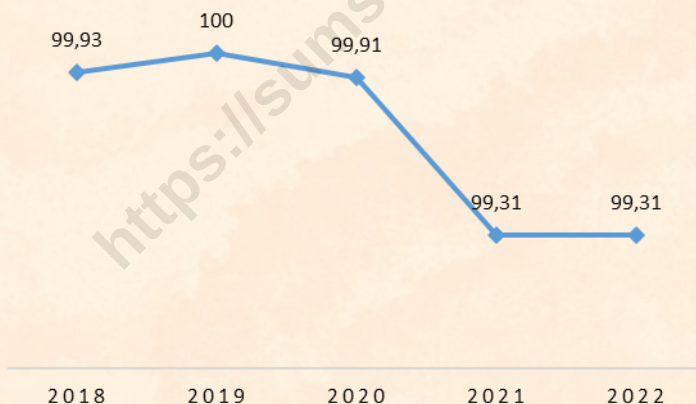


TUJUAN 17

TARGET 17.18

PADA TAHUN 2020, MENINGKATKAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS UNTUK NEGARA BERKEMBANG, TERMASUK NEGARA KURANG BERKEMBANG DAN NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL, UNTUK MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN KETERSEDIAAN DATA BERKUALITAS TINGGI, TEPAT WAKTU DAN DAPAT DIPERCAYA, YANG TERPILAH BERDASARKAN PENDAPATAN, GENDER, UMUR, RAS, ETNIK, STATUS MIGRASI, DIFABILITAS, LOKASI GEOGRAFIS DAN KARAKTERISTIK LAINNYA YANG RELEVAN DENGAN KONTEKS SOSIAL

INDIKATOR 17.18.1.(A) PERSENTASE KONSUMEN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) YANG MERASA PUAS DENGAN KUALITAS DATA STATISTIK



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Kebutuhan Data

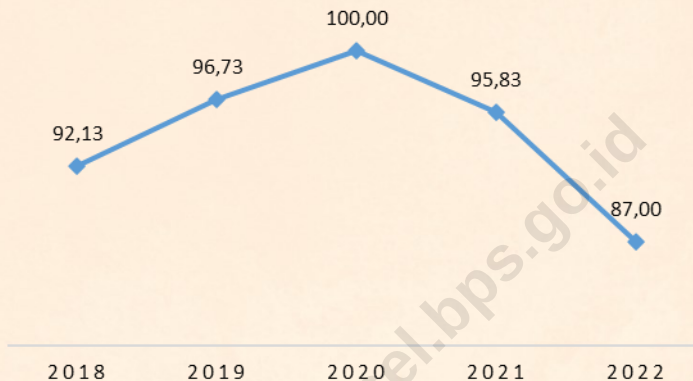
Gambar 17.4
Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik, 2018-2022

Peningkatan ketersediaan data berkualitas tinggi dapat dilihat dari respon pengguna data statistik. Sebagai lembaga statistik nasional, BPS harus dapat menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Selama tahun 2018-2022 persentase konsumen data BPS di Sumatera Selatan yang merasa puas dengan kualitas data statistik sudah sangat baik. Di tahun 2022, persentase konsumen yang puas dengan kualitas data statistik BPS mencapai 99,31 persen.



INDIKATOR 17.18.1.(B)

PERSENTASE KONSUMEN YANG MENJADIKAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK BPS SEBAGAI RUJUKAN UTAMA



Sumber : BPS, Survei Kebutuhan Data

Gambar 17.5

Persentase Konsumen yang Menggunakan Data dan Informasi Statistik BPS sebagai Rujukan Utama, 2018-2022

Persentase konsumen di Sumatera Selatan yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama cenderung menurun dalam kurun waktu 2020-2022. Setelah sempat mencapai capaian 100 persen, persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama sempat menurun di tahun 2021 menjadi 95,83 persen, dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi hanya sebanyak 87,00 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian BPS untuk terus menarik konsumen data dengan menghasilkan data terpercaya yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen data.

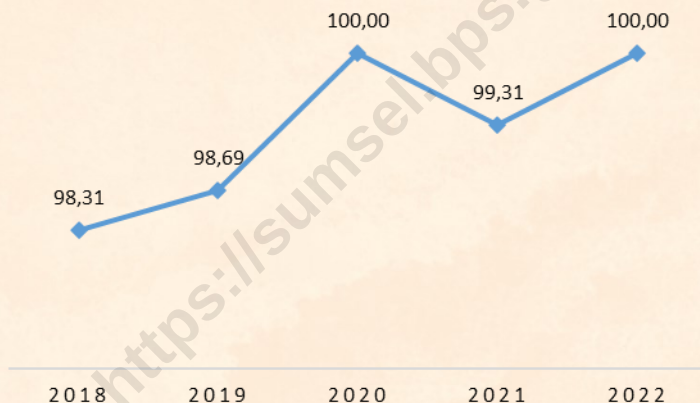


TUJUAN 17

TARGET 17.19

PADA TAHUN 2030, MENGANDALKAN INISIATIF YANG SUDAH ADA, UNTUK MENGEMBANGKAN PENGUKURAN ATAS KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG MELENGKAPI PRODUK DOMESTIK BRUTO, DAN MENDUKUNG PENGEMBANGAN KAPASITAS STATISTIK DI NEGARA BERKEMBANG

INDIKATOR 17.19.2.(D) PERSENTASE KONSUMEN YANG PUAS TERHADAP AKSES DATA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)



Sumber : BPS, Survei Kebutuhan Data

Gambar 17.6

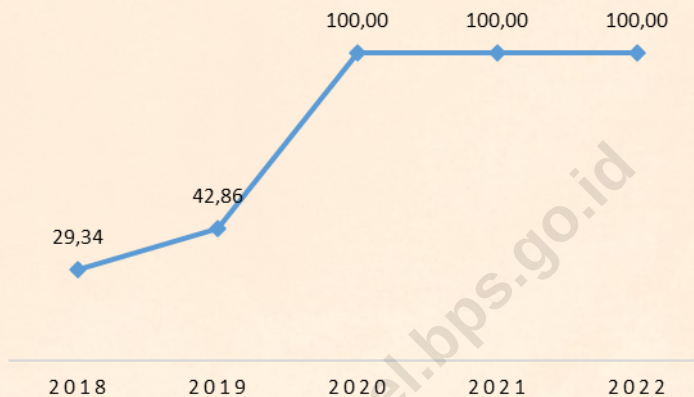
Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Akses Data Badan Pusat Statistik, 2018-2022

Selama tahun 2018-2022, persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan. Di tahun 2018, sebanyak 98,31 persen konsumen mengaku puas terhadap akses data BPS dan angkanya terus meningkat hingga mencapai 100 persen di tahun 2020, dan sedikit menurun menjadi 99,31 persen di tahun 2021, namun dapat kembali mencapai 100 persen di tahun 2022. BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik terpercaya terus berinovasi menyediakan akses yang semakin mudah bagi konsumen data yang membutuhkan data statistik. Selain datang langsung ke Pelayanan Statistik Terpadu di kantor BPS Sumatera Selatan, konsumen data juga dapat mengakses data statistik secara online kapanpun dengan mengakses web BPS.

TUJUAN 17



INDIKATOR 17.19.2.(E) PERSENTASE KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN DATA BPS DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN NASIONAL



Sumber : BPS, Survei Kebutuhan Data

Gambar 17.7
Persentase Konsumen yang Menggunakan Data BPS
dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Nasional, 2018-2022

Konsumen data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadikan data tersebut sebagai perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional telah mencapai 100 persen. Angka tersebut terus mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya sebesar 29,34 persen di tahun 2018, dan 42,86 persen di tahun 2019. Peningkatan angka tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan kemampuan BPS sebagai lembaga statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2022. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2019. *BRS Kemiskinan*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2020. *BRS Kemiskinan*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2021. *BRS Kemiskinan*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2021. *BRS Ketenagakerjaan*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2021. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2022. *Buku Saku dan Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2018-2022*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2022. *BRS Kemiskinan*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2022. *BRS Ketenagakerjaan*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2022. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2023. *Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data Volume 8*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2023. *BRS Ekonomi Sumatera Selatan*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2023. *BRS Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2023. *BRS Indeks Pembangunan Manusia*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2023. *BRS Kemiskinan*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2023. *BRS Ketenagakerjaan*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2023. *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2023. *Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan 2020-2035*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- Sumsel.bps.go.id. 2023. *(Metode Baru) Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Selatan 2021-2022*. Diakses dari <https://sumsel.bps.go.id/indicator/34/880/1/-metode-baru-aspek-indeks-demokrasi-indonesia-idi-sumatera-selatan.html> pada tanggal 8 Desember 2023.

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN***

Jalan Kapten Anwar Sastro No.1131 Palembang

Telepon: (0711) 353174, Fax: (0711) 353174

Email: bps1600@bps.go.id